

Agropolitan *Jagung*

Mahludin H. Baruwadi

Fitri Hadi Yulia Akib

ideas
PUBLISHING

IP. 45.10.2017



Mahludin H. Baruwadi

Fitri Hadi Yulia Akib

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh **Ideas Publishing**, Oktober 2017

Alamat: Jalan Gelatik No. 24 Kota Gorontalo

Telp/Faks. 0435 830476

surel : infoideaspublishing@gmail.com

Anggota Ikapi, No. 001/gtlo/II/14

ISBN : 978-602-6635-41-9

Penyunting: Abdul Rahmat

Penata Letak: Dede Yusuf

Ilustrasi dan Sampul: Andri Pahudin

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta

Pasal 4

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Agropolitan *Jagung*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat kesehatan dan kesempatan kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku Agropolian Jagung.

Agropolitan menjadi salah satu model pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo saat awal berdirinya provinsi ini sebagai daerah otonomi sendiri. Pada tahun 2002 Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo menetapkan tiga program unggulan dalam memacu pembangunannya, yaitu pengembangan sumberdaya manusia, agropolitan dan etalase perikanan. Dari ketiga program unggulan ini Agropolitan menjadi sangat menonjol dengan menjadikan jagung sebagai *entry point*, sehingga Gorontalo terkenal sebagai Provinsi Agropolitan Jagung.

Buku ini memotret pelaksanaan agropolitan jagung di Provinsi Gorontalo terutama dalam tataran implementasinya, serta mengkaji keunggulan jagung yang dijadikan sebagai *entry point*. Materi buku ini merupakan rangkuman dari beberapa hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Oleh karena itu Buku ini tidak saja berisi tentang informasi tentang pelaksanaan agropolitan jagung tetapi juga menguraikan metodologi yang digunakan dalam menguraikan berbagai hal yang berhubungan isi buku. Hal ini menjadikan buku sangat penting untuk Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan agropolitan serta penting juga bagi mahasiswa, baik program sarjana, magister maupun doctor sebagai referens untuk melakukan studi sejenis.

Buku ini terdiri dari sepuluh bab, yaitu: pendahuluan, konsep agropolitan, metodologi kajian keunggulan jagung dan implementasi

agropolitan, keragaan jagung Gorontalo, keunggulan jagung sebagai komoditi agropolitan, ekonomi wilayah jagung, metode perbandingan eksponensial jagung, implementasi kebijakan agropolitan jagung, strategi pengembangan nilai tambah jagung dan pentup

Selesainya penulisan buku ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terimakasih kepada Menteri Pendidikan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan dan ahibah penelitian kompetensi. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Gorontalo yang telah memfasiltasi penulis dalam melakukan berbagai penelitian kerjasama Pemda dan menjadikan penulis sebagai narasumber dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan pemerintah daerah. Hal ini menjadikan penulis memiliki kemudahan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan agropolitan jagung.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan rekomendasi dan diijin yang berhubungan dengan penulisan buku ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada intansi terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota atas berbagai data dan informasi yang telah diberikan dalam penulisan buku. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupu tidak langsung penulis menyampaikan terimakasih, semoga Allah SWT membalas berbagai kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulisan buku.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang membutuhkannya.

Gorontalo, Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Konsep Agropolitan	5
BAB III Metodologi Kajian Keunggulan Jagung dan Implementasi Agropolitan	15
BAB IV Keragaan Jagung Gorontalo	23
BAB V Keunggulan Jagung Sebagai Komoditi Agropolitan	29
BAB VI Ekonomi Wilayah Jagung.....	41
BAB VII Metode Perbandingan Eksponensial Keunggulan Jagung.....	49
BAB VIII Implementasi Kebijakan Agropolitan Jagung	57
BAB IX Strategi Pengembangan Nilai Tambah Jagung.....	81
BAB X Penutup	91
Daftar Pustaka.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

Istilah agropolitan telah mengemuka dalam tataran konsep atau teori maupun implementasi kebijakan. Dalam tataran konsep, dilakukan pencarian tentang asal dari mana agropolitan dapat didekati dengan konsep yang telah ada. Agropolitan tidak lain merupakan hasil pendekatan terhadap teori pembangunan yang berbasis pada sektor pertanian, atau pembangunan pertanian. Berdasarkan asal katanya agropolitan berasal dari kata agro yang berarti pertanian dan politan yang berarti kota, sehingga agropolitan berdasarkan asal katanya berarti kota pertanian.

Konsep pembangunan agropolitan diangkat dari pemikiran Myrdal dalam konteks keadaan Negara-negara Asia yang umumnya berpenduduk padat, serta system pertaniannya intensif dalam skala usaha kecil. Friedman dan Douglass pada tahun 1975 menawarkan konsep agropolitan sebagai kritik dari *teori trickle down effect*, yang menegaskan bahwa pembangunan di pusat-pusat perkotaan agar hasilnya bisa menetes ke perdesaan. Kawasan agropolitan diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan Desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan Desa-desa di sekitarnya yang membentuk kawasan agropolitan

Dalam Pedoman Agropolitan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian agropolitan diartikan sebagai pengembangan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis, yang diharapkan dapat melayani dan mendorong

kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kawasan sentra produksi pangan agropolitan merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kawasan sentra produksi pangan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya. Dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada.

Agropolitan menjadi salah satu model pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo pada awal berdirinya provinsi ini sebagai daerah otonomi sendiri. Sejak tahun 2002-2012 Pemda Provinsi Gorontalo menetapkan tiga program unggulan dalam memacu pembangunannya, yaitu pengembangan sumberdaya manusia, agropolitan dan etalase perikanan. Untuk program agropolitan, komoditi jagung dijadikan komoditi sentral adalah jagung sehingga program ini lebih dikenal dengan nama Agropolitan dengan *entry point* jagung.

Menurut Pemda Provinsi Gorontalo, program agropolitan dengan *entry point* jagung merupakan salah satu pendorong terjadinya perbaikan ekonomi makro selang tahun 2002-2008. Indikatornya terlihat antara lain, pendapatan per kapita naik dari 2,5 juta menjadi 4,9 juta, pertumbuhan ekonomi naik dari 6,45% menjadi 7,51 %, kemiskinan turun dari 32,13% menjadi 24,88%. Dari sisi mikro, produksi jagung naik dari 7.000 ton menjadi 752.727 ton. Kondisi pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi 7,68%, kemiskinan 18,02%, dan pengangguran terbuka 4,61%. produksi jagung 605.000 ton.

Buku ini menguraikan Agropolitan Jagung, sebagai implementasi kebijakan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Buku ini selain

menguraikan konsep tentang agropolitan, juga menguraikan secara detail tentang jagung sebagai komoditi yang menjadi pintu masuk dalam implementasi model pembangunan agropolitan.

Data dan informasi yang menjadi isi buku ini adalah hasil berbagai penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun-tahun sebelumnya, baik sebagai ketua maupun anggota peneliti. Penelitian yang dilakukan ini biayanya bersumber dari hibah kementerian dan pemerintah daerah. Data dan informasi dalam buku ini disesuaikan dengan tahun dilaksanakan penelitian, hal ini diasumsikan tetap *up to date* karena berhubungan dengan metodologi yang dapat dijadikan referens oleh pembaca untuk mendapatkan data dan informasi yang sama di tahun yang berbeda.

Uraian tentang evaluasi pelaksanaan program agopolitan disertai dengan metodologi menjadikan buku ini penting untuk Pemerintah Daerah, sebagai salah satu acuan dalam melakukan perencanaan pembangunan di wilayahnya. Bagi mahasiswa, baik program sarjana, magister maupun doktor buku ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan studi sejenis yang berhubungan dengan evaluasi program pembangunan daerah atau keunggulan komoditi pertanian.

BAB II

KONSEP AGROPOLITAN

Sebagai sebuah pendekatan pengembangan wilayah, menurut Rustiadi dan Hadi (2004) ada tiga tahapan yang perlu dilakukan dalam pengembangan kawasan Agropolitan. Tahap awal pengembangan agropolitan adalah penetapan lokasi dengan melihat empat karakteristik utama yaitu : (1) Tingkat kemajuan wilayah; (2) Luas wilayah; (3) Batas wilayah secara fungsional dalam arti melihat ciri agroklimat dan lahan, serta pengusahaan usaha tani yang sama; (4) Kemajuan sumberdaya manusia/petani. Tahap berikutnya adalah penyusunan produk tata ruang dan bentuk organisasi pengelolaan sesuai dengan kebutuhan (dihindari langkah penyeragaman organisasi). Setelah itu adalah tahap penguatan sumberdaya manusia dan kelembagaan, sehingga bisa dihindari adanya peluang pengaliran nilai tambah yang tidak terkendali keluar kawasan.

Dengan demikian pada tahap awal aspek ruang dan penataan ruang termasuk penentuan dan batasan lokasi kawasan Agropolitan itu sendiri menjadi suatu hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan. Menurut pemikiran Friedmann dan Douglass (1976), konsep agropolitan terdiri dari distrik-distrik agropolitan dan distrik agropolitan didefinisikan sebagai kawasan pertanian pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk rata-rata 200 jiwa per Km². Efisiensi usahatani akan terjadi apabila dilaksanakan *one distrik one commodity*. Dalam distrik agropolitan ini akan dijumpai kota-kota tani yang berpenduduk 10.000 - 25.000 jiwa.

Batas distrik dinyatakan dalam radius sejauh 5 - 10 km atau kurang lebih setara dengan 1 jam perjalanan dengan sepeda. Dimensi luasan geografis wilayah agropolitan ini akan menghasilkan jumlah penduduk total antara 50.000 - 150.000 penduduk yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Sektor-sektor lain yang berkembang hanya karena ada keterkaitannya dalam menunjang pertumbuhan sektor pertanian. Di sini Friedmann tidak membedakan secara spesifik bentuk pertanian modern atau tidaknya, tetapi mungkin lebih cenderung menggunakan referensi pertanian modern yang ada di Amerika atau di Eropa.

Menurut Sitorus dan Nurwono (1998) *dalam* Harun (1999) berdasarkan definisi tersebut apabila besaran penduduk yang menjadi ukuran, maka satu distrik agropolitan, setara dengan 1 Wilayah Pengembangan Partial (WPP) permukiman transmigrasi. Namun bila dilihat dari luas wilayahnya (sekitar 100 - 250 km² atau 10.000 - 25.000 ha.) ukurannya dapat lebih kecil dari luasan 1 WPP. Secara administratif luasan dan besaran penduduk ini setara dengan luasan skala wilayah kecamatan di luar P. Jawa, yang terdiri dari 15 - 30 desa, dimana ibukota kecamatan dapat berpenduduk sampai dengan 25.000 jiwa dan sudah dapat berfungsi sebagai suatu simpul jasa distribusil.

Penerapan konsep agropolitan akan sangat penting artinya bagi pengembangan pembukaan wilayah *frontier* seperti pembangunan permukiman transmigrasi, karena dapat dimulai dalam awal pertumbuhan wilayah. Untuk menumbuhkan satu distrik agropolitan yang berpenduduk antara 50.000 - 150.000 penduduk atau identik dengan 10.000 - 40.000 KK, maka distrik agropolitan ini identik dengan pembangunan 1 - 4 Wilayah Pengembangan Partial (WPP) permukiman transmigrasi.

Dalam konsep pengembangan wilayah permukiman transmigrasi setiap WPP terdiri dari beberapa Satuan Kawasan Permukiman (SKP)

yang memiliki daya tampung 2.000 - 2.500 KK dan setiap SKP terdiri dari beberapa Satuan Permukiman (SP) yang memiliki daya tampung 300 - 500 KK. Setiap SP memiliki simpul jasa koleksi dan distribusi barang dengan skala yang berjenjang dan merupakan pusat permukiman kawasan pertanian. Menurut konsep pengembangan wilayah transmigrasi ini, maka setiap WPP dapat merangsang tumbuhnya satu pusat kota pertumbuhan (orde pertama). Hal ini berarti dalam satu distrik agropolitan (= 1 WPP) akan dapat menumbuhkan 1- 4 kota-kota tani (Orde II) dimana setiap kota tani berpenduduk 5.000 -25.000 jiwa atau 1.000 - 5.000 KK.

Jarak antara kota tani utama (Orde I) dengan pusat pertumbuhan yang sudah berkembang berkisar antara 35 - 60 Km disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan antar kota tani (Orde II dan Orde III) yang berada dalam satu distrik agropolitan, berjarak 15 - 35 Km. Setiap Orde kota berfungsi sebagai simpul jasa koleksi dan distribusi dengan skala-nya masing-masing, berjenjang (hierarki), merupakan pusat pelayanan permukiman dan antar simpul dihubungkan oleh jaringan transportasi yang sesuai.

Integrasi desa dan kota yang ada kedalam konsep distrik agropolitan, dilakukan untuk menghindari tumbuhnya kota-kota diluar kendali sistem pengembangan wilayah agropolitan. Upaya ini selain menghindari adanya kesenjangan antara permukiman yang ada dengan pengembangan kota-kota tani mengintegrasikan penduduk lokal dalam skim pengembangan wilayah agropolitan serta sekaligus merupakan upaya meningkatkan fungsi desa dan kota yang ada menjadi kota-kota tani. Kota-kota tani yang direncanakan tidak selalu kota baru. Sistem jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan kota utama dengan kota-kota orde lainnya, harus menunjang sesuai dengan Undang-Undang Jalan (regional, arteri utama, arteri sekunder, penghubung,

kolektor). Karena itu pula sistem transportasi, jaringan jalan, moda transportasi serta interkoneksi sistem jaringan secara regional harus dirancang secara terpadu dengan sistem kota-kota tani. Dengan demikian tidak bisa dihindari lagi bahwa pengembangan wilayah agropolitan harus memiliki blue-print pembangunan wilayah (*Masterplan Regional Development*) yang komprehensif untuk jangka waktu yang panjang.

Ditinjau dari aspek tata ruang maka secara umum struktur hierarki sistem kota-kota Agropolitan diuraikan sebagai berikut :

Orde yang paling tinggi (kota tani utama) dalam lingkup wilayah Agropolitan skala besar berfungsi:

- Kota perdagangan yang berorientasi ekspor ke luar daerah (nasional dan internasional) dan bila berada di tepi pantai maka kota ini memiliki pelabuhan samudra.
- Pusat berbagai kegiatan manufacturing final industri pertanian (*packing*), stok pergudangan dan perdagangan bursa komoditas.
- Pusat berbagai kegiatan tersier agrobisnis, jasa perdagangan, asuransi pertanian, perbankan dan keuangan
- Pusat berbagai pelayanan termasuk general agro-industry services.

Orde kedua (pusat distrik agropolitan) yang berfungsi sebagai:

- Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis
- Pusat kegiatan agro-industri berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agro-bisnis.
- Pusat pelayanan agro-industri khusus (*special agro-industry services*), pendidikan, pelatihan dan pemuliaan tanaman unggulan.

Orde ketiga (pusat satuan kawasan pertanian)

- Pusat perdagangan lokal yang ditandai dengan adanya pasar harian
- Pusat koleksi komoditas pertanian yang dihasilkan sebagai bahan mentah industri
- Pusat penelitian, pembibitan dan percontohan komoditas
- Pusat pemenuhan pelayanan kebutuhan permukiman pertanian
- Koperasi dan informasi pasar barang perdagangan.

Selanjutnya faktor lain yang perlu dipertimbangkan selain dari penetapan lokasi dan penataan ruang adalah pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan. Menurut Rustiadi dan Hadi (2004) semangat dasar dari kebijakan agropolitan adalah proses penciptaan nilai tambah di kawasan perdesaan oleh masyarakat sendiri. Pelaksanaan kebijakan tanpa keterlibatan masyarakat dalam arti yang sesungguhnya (yaitu terutama melalui peran perekonomian yang nyata) pada hakekatnya kurang sejalan dengan semangat dasar konsep agropolitan ini, karena hal itu hanya mengulangi kesalahan pembangunan yang telah diterapkan selama ini. Berhubung pelaksanaan pembangunan tidak bisa dijalankan oleh masyarakat perdesaan itu sendiri, maka bisa dipilih pola kemitraan dalam seluruh tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan implementasinya.

Kemitraan adalah strategi aliansi bisnis yang dilakukan lebih dari dua pihak dengan prinsip saling membutuhkan, menguntungkan, memperkuat, serta memiliki kesetaraan antar pihak yang bermitra dengan mengandalkan prinsip kesetiaan, transparansi, bermanfaat dan menguntungkan. Kemitraan dimaksud melibatkan pihak masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Kemitraan menuntut dukungan institusi kemitraan gabungan semua stakeholders terkait sebagai refleksi dari kebersamaan *public-private-community patnership*.

Untuk menjamin bahwa usaha yang dilakukan seseorang untuk komunitasnya akan menghasilkan keuntungan yang setimpal dengan usaha yang telah dilakukan, maka kondisi dasar dari pengembangan agropolitan harus dipenuhi yaitu: pembatasan wilayah yang selektif (untuk mencegah lebih banyak transfer sumberdaya dari luar); kepemilikan aset secara komunal (untuk menghindari pemanfaatan aset komunal untuk kepentingan privat); akses yang sama terhadap kekuatan sosial (untuk mencegah akumulasi surplus sosial pada sekelompok elit).

Dengan demikian jelaslah bahwa pengembangan kawasan agropolitan membutuhkan upaya-upaya penguatan kapasitas masyarakat lokal. Penguatan kapasitas masyarakat harus diupayakan terbentuk secara berkelanjutan dan tidak menciptakan ketergantungan-ketergantungan pada berbagai pihak. Pengembangan kapasitas harus diupayakan tumbuh secara mandiri di masyarakatnya sendiri. Untuk itu pendekatan pembangunan harus mampu mendorong terjadinya proses pembelajaran secara sosial (*social learning*).

Social learning terjadi ketika institusi dalam suatu agropolitan mampu meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam prakteknya diskusi dalam bentuk kelompok yang bisa saling mengkritisi permasalahan yang dihadapi merupakan salah satu teknik yang berguna. Selain itu kampanye-kampanye rutin yang mencoba mengangkat masalah dan ide-ide baru juga merupakan sarana yang tepat untuk mengembangkan *social learning*.

Pengembangan Agropolitan memerlukan terjadinya reorganisasi pembangunan ekonomi wilayah perdesaan melalui strategi peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan dengan memerlukan beberapa dukungan kebijakan agar strategi tersebut mampu meningkatkan kinerja ekonomi perdesaan, seperti antara lain terjadinya redistribusi aset, terutama yang menyangkut lahan dan kapital. Proses

redistribusi asset tersebut tidak berarti pengalihan asset dari petani yang mempunyai areal luas ke petani kecil melalui reformasi agraria dengan pengaturan semata, tetapi juga proses redistribusi tersebut dilakukan secara sukarela melalui serangkaian kebijakan seperti :

1. Transfer hak-hak atas lahan sesuai dengan harga tawaran yang menarik bagi petani dan pemilik lahan dengan bantuan lembaga keuangan atau perkreditan yang dibantu oleh pemerintah.
2. Pengembangan pengelolaan kelembagaan lahan pertanian secara bersama-sama antara petani kecil untuk mendapatkan manfaat skala ekonomi, melalui insentif peningkatan mutu lahan dan penyediaan kredit. Dengan cara demikian, maka penguatan pengelolaan kelembagaan pengolahan lahan akan diikuti oleh redistribusi kapital melalui pemberian fasilitas kredit kepada kelompok-kelompok tani.
3. Menyediakan reservasi lahan pertanian melalui perpajakan dan transfer, dimana kebijakan ini bertujuan untuk menahan laju konversi lahan pertanian, terutama ditujuk pada lahan dengan produktivitas yang tinggi. Dengan kebijakan penyediaan reservasi tersebut, maka daya dukung produk pertanian di wilayah perdesaan untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri dapat dipertahankan.

Otoritas perencanaan dan pengambilan keputusan akan didesentralisasikan sehingga masyarakat yang tinggal di perdesaan akan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perkembangan dan pembangunan daerahnya sendiri. Di samping itu pengetahuan lokal (*local knowledge*) akan mudah diinkorporasikan dalam proses perencanaan jika proses itu dekat dengan rumah tangga dan produsen perdesaan. Transformasi wewenang dari pusat ke daerah (desentralisasi) dan demokratisasi sebagai bagian dari perubahan politik di Indonesia dan negara Asia lainnya berdampak terhadap

perencanaan pembangunan perdesaan bagaimana mengikutsertakan pembangunan kapasitas lokal (*local capacity building*) dan partisipasi masyarakat dalam suatu program yang menumbuhkan manfaat mutual bagi masyarakat perdesaan dan perkotaan (Douglass, 1998).

Lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi modal. Pada proses awal pengembangan kawasan agropolitan lembaga keuangan yang dibutuhkan adalah lembaga keuangan yang menyediakan dana dengan tingkat suku bunga rendah atau tingkat suku bunga yang tersubsidi. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan tujuan dari pengembangan kawasan agropolitan akan menciptakan surplus pendapatan masyarakat. Agar surplus pendapatan ini memiliki dampak ekonomi bagi pemilik surplus pendapatan tersebut dan bagi pengembangan sektor ekonomi lainnya, maka surplus pendapatan yang disimpan di lembaga keuangan di wilayah kawasan agropolitan dapat digunakan sebagai salah satu sumber investasi di kawasan tersebut.

Organisasi/kelembagaan petani meliputi organisasi/kelembagaan formal maupun non-formal. Lembaga ini akan sangat berperan ketika hubungan antara petani dengan industri pengolahan diformalkan dalam bentuk kemitraan. Dari sudut perusahaan, negosiasi dengan petani secara individu akan meningkatkan biaya transaksi. Dari sudut petani, keberadaan lembaga petani akan memperkuat posisi petani dalam melakukan kontrak jual dengan perusahaan. Lembaga petani ini dapat berfungsi sebagai media pertukaran informasi sesama petani, khususnya informasi yang berhubungan dengan teknik budidaya pertanian dan perkembangan harga-harga, baik harga input maupun output.

Pengembangan infrastruktur fisik di kawasan agropolitan, seperti yang telah diterapkan pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan (Cianjur, Agam, Minsel, Pemalang, Kutim, Kara, Gorontalo) seharusnya dilakukan setelah tahap-tahap di atas dilakukan dan ditentukan waktu

pelaksanaannya yang tepat sesuai dengan kondisi kawasan masing-masing. Pembangunan infrastruktur publik seharusnya memang menjadi tugas pemerintah. Namun bila itu dilakukan sebelum produk tata ruang dan penguatan SDM serta kelembagaan kemitraan, maka dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan terhadap tujuan pengembangan kawasan agropolitan.

Gambaran ideal dari suatu kawasan agropolitan yang berkembang menurut Rustiadi dan Hadi (2004) adalah:

1. Peran sektor pertanian (sampai ke tingkat *agro-processingnya*) tetap dominan;
2. Pengaturan pemukiman yang tidak memusat, tetapi tersebar pada skala minimal sehingga dapat dilayani oleh pelayanan infrastruktur seperti listrik, air minum, ataupun telekomunikasi (sekitar 300 pelanggan setara dengan 300 kepala keluarga). Infrastruktur yang tersedia dapat melayani keperluan masyarakat untuk pengembangan usahatannya sampai ke aktivitas pengolahannya. Di kawasan agropolitan juga tersedia infrastruktur sosial seperti untuk pendidikan, kesehatan, sampai pada rekreasi dan olah raga. Aksesibilitas yang baik dengan pengaturan pembangunan jalan sesuai dengan kelas jalan yang dibutuhkan dari jalan usahatani sampai ke jalan kolektor dan jalan arteri primer;
3. Mempunyai produk tata ruang yang telah dilegalkan dengan Peraturan Daerah dan konsistensi para pengelola kawasan, sehingga dapat menahan setiap kemungkinan konversi dan perubahan fungsi lahan yang menyimpang dari peruntukannya

BAB III

METODOLOGI KAJIAN KEUNGGULAN JAGUNG DAN IMPLEMENTASI AGROPOLITAN

A. Obyek Penelitian

Untuk mengkaji keunggulan jagung sebagai komoditi agropolitan Gorontalo dilakukan dalam skala wilayah provinsi. Obyeknya adalah keunggulan jagung dan implementasi program agropolitan. Untuk mengkaji obyek ini digunakan metode survei yang merupakan pengumpulan data empirik berdasarkan angket, wawancara, observasi dan diskusi fokus. Kegiatan ini terdiri dari survei data sekunder dan survei data primer. Survei data sekunder dimaksudkan untuk mendapatkan data yang sudah tersedia yang berhubungan dengan pelaksanaan dan keberlanjutan program agropolitan.

B. Definisi Operasional Variabel

Untuk mendapat gambaran yang jelas tentang variabel penelitian ini, berikut digambarkan definisi operasionalnya:

1. Perekonomian wilayah adalah keadaan ekonomi suatu wilayah/ daerah yang menggambarkan perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi seperti produksi dan tenaga kerja.
2. PDRB adalah penjumlahan nilai tambah produk seluruh sektor ekonomi daerah dalam suatu periode waktu tertentu, dalam rupiah.

3. PDRB harga konstan adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihitung berdasarkan atas harga tahun dasar tertentu, dalam penelitian ini digunakan tahun dasar 2000, dalam rupiah.
4. Luas tanam adalah jumlah penanaman komoditi tanaman pangan yang dilakukan oleh petani dalam suatu wilayah selama satu tahun, dalam hektar
5. Luas panen adalah jumlah panen yang dilakukan oleh petani dalam suatu wilayah selama satu tahun, dalam hektar
6. Produksi adalah jumlah produksi tanaman pangan yang dihasilkan oleh suatu wilayah, dalam ton.
7. Indeks Lokalisasi adalah nilai yang menunjukkan ukuran penyebaran atau konsentrasi relatif komoditas tanaman pangan di Provinsi Gorontalo
8. Indeks spesialisasi adalah nilai yang menunjukkan ukuran spesialisasi Provinsi Gorontalo terhadap komoditas tanaman pangan
9. Sektor basis adalah sektor yang menjadi penggerak ekonomi dalam suatu wilayah.

C. Jenis dan Sumber Data

Kajian keunggulan jagung dan implementasi agropolitan menggunakan data sekunder dan sedangkan data primer digunakan untuk melengkapi keberadaan data sekunder yang diperoleh. Data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait dengan data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan kajian, yaitu data tentang gambaran umum lokasi penelitian, PDRB, jumlah penduduk, data luas panen dan luas tanam jagung. Data diperoleh dari Kantor Statistik Provinsi Gorontalo dan Kantor Statistik Kabupaten/kota. Data tentang pelaksanaan program

agropolitan di tingkat kabupaten/kota diperoleh dengan menggunakan interview secara mendalam.

D. Metode Analisis Data

Analisis data keunggulan dan implementasi agropolitan jagung menggunakan teknik analisis kuantitatif-deskriptif berupa penyajian tabel-tabel, rasio dan persentase. Analisis data yang digunakan sebagaimana uraian berikut.

1. Analisis ekonomi wilayah, spesialisasi, lokalisasi dan *Location Quotient* (LQ).

(i) Analisis Lokalisasi

Analisis ini digunakan untuk mengukur penyebaran atau konsentrasi relatif komoditas tanaman pangan di Provinsi Gorontalo. Rumus yang digunakan untuk analisis lokalisasi adalah :

$$\alpha = (v_i/V_i) - (v_t/V_t)$$

dengan batasan :

v_i = keadaan luas panen/luas tanam tanaman pangan di tingkat kecamatan

V_i = keadaan luas panen/luas tanam tanaman pangan di tingkat provinsi

v_t = total keadaan luas panen/luas tanam komoditas tanaman pangan di tingkat kecamatan

V_t = total keadaan luas panen/luas tanam komoditas pangan di tingkat provinsi

α = koefisien lokalisasi

Koefisien lokalisasi diperoleh dengan menjumlahkan $(v_i/V_i)-(v_t/V_t)$ yang bertanda positif, dengan ketentuan :

$\alpha \geq 1$: komoditas pangan terkonsentrasi pada satu wilayah,

dan

$\alpha < 1$: komoditas pangan menyebar pada beberapa wilayah

(ii) Analisis Spesialisasi

Analisis ini digunakan untuk melihat spesialisasi Provinsi Gorontalo terhadap komoditas tanaman pangan dengan rumus sebagai berikut:

$$\beta = (v_i/v_t) - (V_i/V_t)$$

dengan batasan :

v_i = keadaan luas panen/luas tanam komoditas tanaman pangandi tingkat kecamatan

V_i = keadaan luas panen/luas tanam komoditas tanaman pangan di tingkat provinsi

v_t = total keadaan luas panen/luas tanam tanaman pangan di tingkat kecamatan

V_t = total keadaan luas panen/luas tanam tanaman pangandi tingkat provinsi

β = koefisien spesialisasi

Koefisien spesialisasi diperoleh dengan menjumlahkan komponen rumus $(v_i/v_t) - (V_i/V_t)$ yang bertanda positif dengan ketentuan:

$\beta \geq 1$: suatu wilayah menspesialisasikan pada komoditas pangan

$\beta < 1$: tidak terspesialisasi

(iii) Analisis Basis

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi komoditas tanaman pangan di Provinsi Gorontalo yang diusahakan dalam suatu wilayah kecamatan termasuk ke dalam sektor basis dan non basis dengan rumus sebagai berikut:

$$LQ = (v_i/v_t) / (V_i/V_t)$$

dengan batasan :

v_i = luas panen/luas tanam komoditas tanaman pangan di tingkat kecamatan

V_i = luas panen/luas tanam komoditas tanaman pangan di tingkat provinsi

v_t = total luas panen/luas tanam komoditas tanaman pangan di tingkat kecamatan

V_t = total luas panen/luas tanam komoditas tanaman pangan di tingkat provinsi

LQ = koefisien location quotient

Komoditas tanaman pangan yang ada di suatu wilayah merupakan sektor basis apabila koefisien $LQ \geq 1$ sedangkan apabila $LQ < 1$ maka komoditas tanaman pangan tersebut bukan merupakan sektor basis.

2. Kontribusi Jagung Pada Ekonomi Wilayah

Analisis ekonomi wilayah yang digunakan sebagai berikut : 1) analisis perkembangan jagung pada PDRB dari tahun ke tahun, 2) analisis struktur perekonomian daerah dari tahun ke tahun, 3) analisis laju pertumbuhan ekonomi jagung dari tahun ke tahun.

(i) Kontribusi Jagung pada PDRB

Analisis ini digunakan untuk menunjukkan perkembangan kontribusi subsektor perkebunan jagung dari tahun ke tahun. Data PDRB yang digunakan berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 2000.

(ii) Analisis struktur ekonomi

Analisis ini untuk menunjukkan struktur ekonomi Jagung dalam perekonomian Provinsi Gorontalo berdasarkan nilai PDRB. Rumus yang digunakan untuk analisis ini adalah :

$$\text{Struktur} = \frac{\text{Nilai PDRB setiap sektor}}{\text{Nilai PDRB total}} \times 100 \%$$

Berdasarkan data struktur ini dilakukan analisis statistika terhadap kontribusi jagung dalam struktur perekonomian Provinsi Gorontalo secara keseluruhan dengan menggunakan data tahun awal pengamatan dan data tahun akhir pengamatan.

(iii) Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi dimaksudkan untuk menganalisis laju pertumbuhan ekonomi jagung dalam ekonomi wilayah Provinsi Gorontalo. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB}_x = \frac{\text{PDRB}_x - \text{PDRB}_{x-1}}{\text{Nilai PDRB total}} \times 100 \%$$

dengan batasan :

PDRB_x = Pendapatan Domestik Regional Bruto tahun tertentu

PDRB_{x-1} = Pendapatan Domestik Regional Bruto 1 tahun sebelumnya

(iv) Analisis SWOT

Untuk penetapan strategi pengembangan komoditi jagung dan strategi pengembangan program agropolitan untuk komoditi lain digunakan analisis SWOT. Pengkajian terutama dilakukan dengan memperhatikan keadaan saat ini (*existing condition*) dan kondisi yang diharapkan (*expected condition*), dan strategi untuk mencapai kondisi yang diharapkan, serta kebijaksanaan apa yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan strategi yang telah disusun tadi.

BAB IV

KERAGAAN JAGUNG GORONTALO

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2001, Wilayah Gorontalo ditetapkan sebagai Provinsi, lepas dari Provinsi Induk Sulawesi Utara. Pada awal terbentuknya Provinsi Gorontalo baru memiliki 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka di Provinsi Gorontalo kemudian terbentuk 2 kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan UU RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. (Bappeda Provinsi Gorontalo, 2017)

Luas wilayah Provinsi Gorontalo 12.215,44 km², atau hanya sebesar 0,63 persen dari luas wilayah Indonesia. Saat ini, Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah pemerintahan yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 66,25 km², Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.207,58 km², Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 2.517,36 km², Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.244,31 km², Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.889,04 km² dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 1.676,15 km². Dari keenam wilayah ini Kabupaten Pohuwato memiliki luas wilayah terbesar diikuti oleh Kab. Boalemo,

sedangkan Kota Gorontalo memiliki luas wilayah terkecil sebesar 0,54% dari total luas wilayah Gorontalo.

Lahan pertanian yang ada sebagian besar diusahakan oleh masyarakat untuk menanam sejumlah komoditi utama seperti padi sawah dan jagung. Dalam rangka pengembangan Program Agropolitan, jagung dijadikan komoditi unggulan.

Dari luas wilayah Provinsi Gorontalo 12.215,44 Km², dimana untuk potensi lahan sawah yang ditanami padi seluas ± 35.685 ha yang terdiri dari sawah irigasi ± 27.674 ha dan sawah non irigasi seluas 8.011 ha. Juga terdapat potensi luasan lahan kering seluas 285.449 ha yang terdiri dari ladang/huma 37.399 ha, tegal/kebun 191.941 ha, lahan kering yang sementara tidak diusahakan 56.109 ha. Disamping itu pada lahan perkebunan kelapa dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi tanaman pangan seperti jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian.

Berdasarkan Data BPS (2016) Provinsi Gorontalo memiliki sumber daya lahan yakni potensi luas areal sawah sekitar 35.685 ha. Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah yang terluas areal penggunaannya yaitu 14.298 Ha (40,07%), kemudian Kabupaten Gorontalo Utara 6.242 Ha (17,49 %), Kabupaten Boalemo 5.396 Ha (15,12%), Kabupaten Pohuwato 6.685 Ha (18,73%), Kabupaten Bone Bolango 2.221 Ha (6,22%) dan Kota Gorontalo 843 Ha (2,36 %).

Keadaan pertanian di Provinsi Gorontalo dapat dikelompokkan ke dalam tanaman padi-palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman perkebunan dan peternakan. Jagung termasuk dalam kelompok padi-palawija, sehingga bab ini membahas khusus tentang perkembangan padi-palawija untuk memperlihatkan posisi jagung sebagai komoditas agropolitan. Data yang digunakan adalah data tahun 2012 disesuaikan dengan tahun pelaksanaan penelitian yaitu tahun 2013.

Tabel 1 Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija Provinsi Gorontalo Tahun 2012

No	Komoditi	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1	Padi Sawah	51.155	245.666
2	Padi Ladang	38	1.200
3	Jagung	135.543	644.754
4	Ubi Kayu	307	4.109
5	Ubi Jalar	202	2.002
6	Kedelai	2.851	3.450
7	Kacang Tanah	1.003	1.126
8	Kacang Hijau	154	198

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2013

Padi dan palawija merupakan tanaman pangan yang diusahakan oleh masyarakat Provinsi Gorontalo. Produk kelompok padi-palawija yang umumnya diusahakan oleh masyarakat Gorontalo adalah padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Pada tahun tahun 2012 luas panen dan produksi padi-palawija tersaji pada Tabel 1.

Ditinjau dari luas panen dan produksi, jagung merupakan tanaman pangan yang dominan diusahakan oleh petani Provinsi Gorontalo. Luas panennya hampir mencapai tiga kali dari komoditi padi sawah yang menempati posisi kedua dari capaian luas panen dan produksi. Luas panen jagung 135.543 ha dengan produksi 644.754 ton, sedangkan padi sawah luas panen 51.155 ha dengan produksi 245.666 ton. Dominannya tanaman jagung ini berhubungan dengan kesesuaian iklim dan kebiasaan petani dalam membudidayakan jagung serta dukungan pemerintah dalam budidayanya melalui Program Agropolitan jagung yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pembangunan ekonomi.

Tabel 2 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Jagung Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2012

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/ha)
2008	156.436	753.598	48,17
2009	124.798	567.110	45,60
2010	143.833	679.168	47,22
2011	135.754	605.781	44,62
2012	135.543	644.754	47,57

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2013

Tabel 2 menunjukkan luas panen dan produksi jagung di Provinsi Gorontalo cenderung fluktuatif, bahkan pada tiga tahun terakhir luas panennya cenderung turun. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan luas panen 156.436 ha dengan tingkat produksi 753.598 ton. Hal ini diduga berhubungan dengan periode awal dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012 yang memberikan penguatan pada program agropolitan jagung.

Tabel 3 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung menurut Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo tahun 2012

Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/ha)
Kabupaten Boalemo	37.258	176.598	47,40
Kabupaten Gorontalo	25.138	132.736	52,80
Kabupaten Pohuwato	64.760	299.123	46,19
Kabupaten Bone Bolango	2.008	10.174	50,67
Kab. Gorontalo Utara	6.348	25.958	40,89
Kota Gorontalo	31	166	53,49
Provinsi Gorontalo	135.543	644.754	47,57

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2013

Berdasarkan kabupaten/kota, penghasil jagung tertinggi adalah Kabupaten Pohuwato, dengan luas panen 64.760 ha dan produksi mencapai 64.760 ton. Penghasil jagung terendah adalah Kota Gorontalo dengan luas panen 31 ha dengan produksi mencapai 166 ton. Produktivitas jagung tertinggi dicapai oleh Kota Gorontalo yaitu 53,49 kwintal per hektar dan terendah dicapai oleh Kabupaten Gorontalo Utara dengan capaian 40,89 kwintal per hektar.

BAB V

KEUNGGULAN JAGUNG SEBAGAI KOMODITI AGROPOLITAN

Berdasarkan keberadaannya komoditi tanaman pangan yang dapat dianalisis di Provinsi Gorontalo terdiri dari 7 komoditi, yaitu padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu. Untuk mengkaji keunggulan jagung sebagai komoditi dari komoditas tanaman pangan lainnya, dilihat dari keragaan setiap komoditas tanaman pangan yang meliputi luas tanam dan luas panen menurut kecamatan berdasarkan data tahun 2012. Hasil perbandingan dari keragaan komoditas ini merupakan dasar untuk menetapkan keunggulan komoditas jagung. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis keragaan komoditas tanaman pangan ini adalah analisis lokalisasi, analisis spesialisasi dan analisis basis. Analisis lokalisasi dan spesialisasi dimaksudkan untuk mengukur penyebaran dan spesialisasi komoditas tanaman pangan sedangkan analisis basis dimaksudkan untuk menganalisis wilayah mana saja dalam Provinsi Gorontalo yang komoditas tanaman pangan merupakan sektor basis atau non basis.

A. Indikator Luas Tanam

Salah satu indikator yang dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis keunggulan komoditas jagung dan tanaman pangan lainnya adalah luas tanam komoditi dalam satu tahun. Indikator ini menunjukkan akumulasi penanaman dalam satu tahun yang dilakukan petani.

1. Indeks Lokalisasi

Indeks lokalisasi tanaman pangan menunjukkan penyebaran atau konsentrasi relatif dari komoditi ini di Provinsi Gorontalo. Jika koefisien lokalisasi (α) > 1 , maka komoditas tanaman pangan terkonsentrasi pada wilayah tertentu (dalam hal ini kecamatan) sedangkan jika nilai koefisiennya $\alpha < 1$ maka komoditas tersebut menyebar pada setiap wilayah yang diamati. Semakin kecil nilai koefisien maka semakin menyebar komoditas tersebut.

Berdasarkan Tabel 4 indeks lokalisasi tanaman Provinsi Gorontalo berkisar dari yang terendah 0,163 sampai dengan tertinggi 0,813. Capaian terendah adalah komoditi jagung sedangkan yang tertinggi adalah komoditi padi ladang. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk tanaman pangan di Provinsi Gorontalo jagung adalah merupakan komoditi tanaman pangan yang paling menyebar pada wilayah-wilayah kecamatan, sedangkan komoditi padi ladang merupakan komoditi yang terkonsentrasi pada kecamatan tertentu. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota khusus untuk komoditi jagung nilai terkecil dari koefisien lokalisasinya adalah Kabupaten Boalemo, sedangkan yang tertinggi berada di Kota Gorontalo. Kondisi ini menunjukkan bahwa komoditi jagung paling menyebar di Kabupaten Boalemo, sedangkan di Kota Gorontalo terkonsentrasi pada kecamatan tertentu.

Tabel 4 Indeks Lokalisasi Komoditi Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Luas Tanam Tahun 2012

Kabupaten/ Kota	INDEKS LOKALISASI LUAS TANAM							
	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kedelai	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Kab. Boalemo	0,329	0,000	0,073	0,692	0,378	0,365	0,178	0,445
Kab. Gorontalo	0,225	0,834	0,217	0,717	0,712	0,675	0,440	0,434
Kab. Pohuwato	0,435	0,000	0,064	0,604	0,371	0,296	0,197	0,252
Kab. Bone Bolango	0,237	0,000	0,412	0,877	0,772	0,912	0,582	0,497
Kab. Gorontalo Utara	0,247	0,177	0,212	0,003	0,012	0,012	0,003	0,008
Kota Gorontalo	0,086	0,000	0,910	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010
Provinsi Gorontalo	0,375	0,813	0,163	0,775	0,561	0,533	0,431	0,439

Sumber : Baruwadi, dkk (2014)

2. Indeks Spesialisasi

Selain ukuran penyebaran, hal yang penting dilakukan dalam mengukur keunggulan komoditas komoditas jagung dari komoditas tanaman pangan lainnya adalah dengan menentukan spesialisasi Provinsi Gorontalo terhadap komoditas tanaman pangan. Suatu komoditas dikatakan merupakan spesial bagi suatu wilayah jika nilai koefisien spesialisasi (β) > 1 , sebaliknya jika $\beta < 1$ maka komoditas yang bersangkutan bukan merupakan spesial dari wilayah bersangkutan.

Tabel 5 menunjukkan untuk tingkat provinsi capaian indeks spesialisasi terendah adalah komoditi kacang hijau dengan nilai 0,067 sedangkan yang tertinggi adalah komoditi padi sawah dengan nilai 10,614. Untuk komoditi tanaman pangan yang memiliki nilai koefisien spesialisasi di atas 1, adalah komoditi padi sawah dan komoditi jagung, sedangkan komoditi lainnya koefisien spesialisasinya nilainya kurang dari 1. Berdasarkan kriteria maka padi sawah dan jagung adalah dua

komoditi yang menjadi spesial bagi Provinsi Gorontalo. Menurut kabupaten/kota untuk komoditi padi sawah menjadi spesial juga pada Kabupaten Gorontalo dengan nilai 1,982 dan Kabupaten Pohuwato dengan nilai 1,094, sedangkan untuk komoditi jagung menjadi spesial bagi Kabupaten Gorontalo dengan nilai 3,084 dan Kabupaten Bone Bolango dengan nilai 6,766. Untuk Kota Gorontalo nilai indeks spesialisasi hampir mendekati 1 dengan nilai 0,910, sehingga komoditi jagung hampir menjadi komoditi spesial wilayah ini.

Tabel 5 Indeks Spesialisasi Komoditi Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Luas Tanam Tahun 2012

Kabupaten/Kota	INDEKS SPESIALISASI LUAS TANAM							
	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kedelai	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Kab. Boalemo	0,193	0,017	0,738	0,001	0,001	0,001	0,001	0,017
Kab. Gorontalo	1,982	0,000	3,048	0,027	0,006	-0,071	0,027	0,046
Kab. Pohuwato	1,094	0,000	0,863	0,151	0,003	0,002	0,007	0,006
Kab. Bone Bolango	0,947	0,000	6,766	0,036	0,040	0,040	0,194	0,124
Kab. Gorontalo Utara	0,247	0,177	0,212	0,003	0,012	0,012	0,003	0,008
Kota Gorontalo	0,086	0,000	0,910	0,010	0,000	0,000	0,000	0,010
Provinsi Gorontalo	10,614	0,493	8,276	0,236	0,067	0,070	0,275	0,259

Sumber : Baruwadi, dkk (2014)

3. Basis

Pendekatan lain yang digunakan untuk menilai keunggulan jagung dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi basis dengan menggunakan Analisis *Location Quotient*. Suatu wilayah dikatakan memiliki kekuatan basis pada komoditas perkebunan jika nilai $LQ > 1$, sebaliknya jika $LQ < 1$ dikatakan bukan merupakan kekuatan basis.

Tabel 6 Persentase Wilayah Basis Komoditi Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Luas Tanam Tahun 2012

Kabupaten/ Kota	Jlh Kec.	BASIS LUAS TANAM (Dalam Persen)							
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kedelai	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Kab. Boalemo	7	28,57	28,57	71,43	28,57	28,57	28,57	57,14	57,14
Kab. Gorontalo	18	44,44	0,00	55,56	16,67	22,22	38,89	27,78	44,44
Kab. Pohuwato	13	38,46	0,00	53,85	15,38	30,77	38,46	53,85	53,85
Kab. Bone Bolango	17	23,53	0,00	76,47	11,76	11,76	11,76	47,06	58,82
Kab. Gorontalo Utara	6	50,00	50,00	50,00	50,00	33,33	33,33	33,33	33,33
Kota Gorontalo	6	33,33	0,00	66,67	16,67	0,00	0,00	0,00	16,67
Provinsi Gorontalo	67	46,27	11,94	53,73	10,45	20,90	19,40	38,81	46,27

Sumber : Baruwadi, dkk (2014)

Jumlah kecamatan yang dijadikan sebagai wilayah analisis berjumlah 67 kecamatan dan tersebar pada 6 kabupaten/kota. Berdasarkan luas tanam persentase basis tertinggi ditunjukkan oleh jagung dimana komoditi ini menjadi basis pada 53,73% wilayah kecamatan di Provinsi Gorontalo, diikuti oleh padi sawah dan ubi kayu dengan yang menjadi basis pada 46,27 wilayah kecamatan, sedangkan yang terendah adalah kedelai yang hanya menjadi basis pada 10,45% kecamatan di Provinsi Gorontalo. Untuk komoditi jagung menurut kabupaten/kota, persentase tertinggi ditunjukkan oleh Kabupaten Bone Bolango dimana komoditi jagung menjadi basis pada 76,47% wilayah kecamatannya. Kabupaten yang juga memiliki persentase tertinggi kedua adalah Kabupaten Boalemo dengan persentase kecamatan yang menjadi basis komoditi jagung adalah 71,43%. Secara keseluruhan jagung adalah basis pada minimal 50% wilayah di kecamatan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

B. Indikator Luas Panen

Luas panen menunjukkan luasan yang dapat dipanen oleh petani berdasarkan kegiatan usahatani yang dilakukan dan dihitung selama setahun. Dalam menganalisis keunggulan jagung maka luas panen juga dijadikan sebagai indikator untuk membandingkannya dengan luas tanam, sehingga diperoleh hasil yang akurat.

1. Indeks Lokalisasi

Berdasarkan luas panen indeks lokalisasi komoditi tanaman pangan yang terkecil ditunjukkan oleh komoditi jagung dengan nilai 0,1476, sedangkan yang tertinggi ditunjukkan oleh komoditi padi ladang dengan nilai koefisien 0,9854. Hal ini mengindikasikan jagung merupakan komoditi yang paling menyebar jika dilihat dari luas panen. Hasil capaian ini sama halnya dengan capaian indeks lokalisasi luas tanam sebagaimana uraian sebelumnya. Berdasarkan kabupaten/kota komoditi jagung paling menyebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo, sedangkan Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo cenderung terkonsentrasi pada kecamatan tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa pada umumnya luas panen jagung menyebar pada wilayah-wilayah di kecamatan setiap kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Tabel 7 Indeks Lokalisasi Komoditi Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Luas Panen Tahun 2012

Kabupaten/ Kota	INDEKS LOKALISASI LUAS PANEN							
	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kedelai	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Kab.Boalemo	0,3285	0,0000	0,0693	0,6752	0,4365	0,3522	0,1113	0,3567
Kab.Gorontalo	0,1475	0,0000	0,1876	0,6844	0,5269	0,4329	0,5651	0,5644
Kab.Pohuwato	0,4925	0,0000	0,0586	0,6485	0,2893	0,2487	0,2682	0,2651
Kab.Bone Bolango	0,9784	0,0000	0,8743	0,9971	0,8859	0,9829	0,9866	0,9626
Kab. Gorontalo Utara	0,0826	0,7860	0,0822	0,3876	0,4832	0,5313	0,6497	0,6829
Kota Gorontalo	0,0162	0,0000	0,6135	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8181
Provinsi Gorontalo	0,4184	0,9854	0,1476	0,7869	0,4781	0,4505	0,4103	0,4535

Sumber : Baruwadi, dkk (2014)

2. Indeks Spesialisasi

Berdasarkan luas panen komoditi tanaman pangan yang menjadi spesial di Provinsi Gorontalo adalah komoditi padi sawah dengan nilai 12,051. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka capaian luas tanam. Selain itu komoditi jagung juga menjadi komoditi spesial berdasarkan luas panen dengan nilai 5,974. Nilai ini lebih rendah capaiannya dibandingkan dengan indeks spesialisasi dengan indikator luas tanam. Untuk komditi tanaman pangan lainnya berdasarkan hasil analisis nilainya berada di bawah 1 sehingga berdasarkan kriteria bukan merupakan tanaman spesial Provinsi Gorontalo.

Tabel 8 Indeks Spesialisasi Komoditi Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Luas Tanam Tahun 2012

Kabupaten/Kota	INDEKS SPESIALISASI LUAS PANEN							
	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kedelai	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Kab. Boalemo	0,184	0,000	0,673	0,002	0,002	0,007	0,002	0,010
Kab. Gorontalo	2,091	0,000	2,984	0,037	0,008	0,125	0,035	0,037
Kab. Pohuwato	1,105	0,000	0,751	0,139	0,003	0,014	0,004	0,004
Kab. Bone Bolango	1,033	0,000	5,485	0,056	0,070	0,344	0,205	0,135
Kab. Gorontalo Utara	0,193	0,022	0,292	0,002	0,013	0,013	0,003	0,006
Kota Gorontalo	0,054	0,000	0,221	0,010	0,000	0,000	0,000	0,022
Provinsi Gorontalo	12,051	0,027	5,974	0,031	0,103	0,559	0,310	0,263

Sumber : Baruwadi, dkk (2014)

Menurut kabupaten/kota, komoditi padi sawah dan jagung juga merupakan basis pada beberapa kabupaten/kota. Komoditi padi sawah merupakan spesial pada Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango, sedangkan jagung menjadi spesial pada Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango. Kondisi ini ternyata berbeda jika menggunakan indikator luas tanam sebagaimana uraian sebelumnya.

3. Analisis Basis

Berdasarkan luas panen komoditi jagung masih menjadi komoditi yang tertinggi persentasenya sebagai komoditi basis pada wilayah kecamatan dengan persentase kecamatan sebesar 50,75 %, disusul oleh komoditi padi sawah dengan nilai 46,27% , ubi kayu 43,28% serta ubi jalar 35,82%. Capaian ini sedikit mengalami perbedaan dibandingkan dengan indikator luas tanam baik dalam hal nilai capaian dan urutannya. Untuk capaian persentase wilayah basis komoditi jagung berdasarkan

kabupaten/kota nilainya berkisar yang terendah Kota Gorontalo dengan capaian 50,00 % dan tertinggi Kabupaten Bone Bolango dengan capaian 76,47%. Pencapaian ini agak berbeda dengan indikator luas tanam terutama pada capaian nilai tertinggi, dimana untuk luas tanam yang tertinggi adalah Kabupaten Boalemo.

Tabel 9 Persentase Wilayah Basis Komoditi Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Luas Panen Tahun 2012

Kabupaten/ Kota	Jlh Kec.	PERSENTASE WILAYAH BASIS LUAS PANEN							
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kedelai	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Kab. Boalemo	7	42,86	0,00	57,14	28,57	42,86	71,43	28,57	42,86
Kab. Gorontalo	18	44,44	0,00	55,56	16,67	22,22	38,89	27,78	44,44
Kab. Pohuwato	13	38,46	0,00	53,85	15,38	38,46	61,54	53,85	61,54
Kab. Bone Bolango	17	23,53	0,00	76,47	11,76	23,53	47,06	41,18	58,82
Kab. Gorontalo Utara	6	50,00	33,33	66,67	50,00	33,33	33,33	16,67	33,33
Kota Gorontalo	6	50,00	0,00	50,00	16,67	0,00	0,00	0,00	33,33
Provinsi Gorontalo	67	46,27	2,99	50,75	7,46	23,88	37,31	35,82	43,28

Sumber : Baruwadi, dkk (2014)

Berdasarkan perbandingan keunggulan komoditi jagung dengan komoditi tanaman pangan lainnya berdasarkan analisis lokalisasi, spesialisasi dan basis, maka terlihat jagung memiliki keunggulan karena beberapa hal, yaitu: (1) berdasarkan koefisien lokalisasi jagung merupakan komoditi yang menyebar pada setiap kecamatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota; (2) Koefisien spesialisasi provinsi menunjukkan bahwa jagung adalah komoditi spesial Provinsi Gorontalo selain padi sawah; dan (3) komoditi jagung pada umumnya menjadi basis pada wilayah kecamatan Provinsi Gorontalo.

C. Penyebaran, Spesialisasi dan Basis Komoditas Jagung

Secara khusus uraian subbab ini membandingkan penggunaan dua indikator yang dijadikan acuan dalam menganalisis keunggulan komoditi jagung yaitu luas tanam dan luas panen. Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai capaian koefisien lokalisasi dan spesialisasi jagung untuk indikator luas tanam lebih rendah dibandingkan dengan luas panen. Meskipun demikian hasilnya tidak banyak mempengaruhi pengambilan kesimpulan terhadap konsentrasi maupun spesialisasi komoditi jagung, sebab penggunaan kedua indikator ini menunjukkan kesimpulan yang sama.

Tabel 10 Indeks Lokalisasi dan Spesialisasi Komoditi Jagung Provinsi Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Luas Tanam dan Luas Panen Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Indeks Lokalisasi		Indeks Spesialisasi	
	Luas Tanam	Luas Panen	Luas Tanam	Luas Panen
Kabupaten Boalemo	0,0734	0,0693	0,7376	0,67279
Kabupaten Gorontalo	0,2173	0,1876	3,0481	2,98373
Kabupaten Pohuwato	0,0642	0,0586	0,8627	0,75114
Kabupaten Bone Bolango	0,4121	0,8743	6,7661	5,48501
Kabupaten Gorontalo Utara	0,2116	0,0822	0,2116	0,29222
Kota Gorontalo	0,9104	0,6135	0,9104	0,22092
Provinsi Gorontalo	0,1627	0,1476	8,2761	5,97390

Sumber : Baruwadi, dkk (2014)

Untuk analisis basis berdasarkan Tabel 11 penggunaan indikator luas tanam dan luas panen memberikan hasil yang cukup berbeda, dimana terdapat empat wilayah analisis yang nilai lebih rendah apabila menggunakan indikator luas panen dibandingkan dengan luas tanam. Mengingat analisis basis berhubungan langsung dengan output yang

dihasilkan maka sebaiknya dalam menganalisis sektor basis komoditi pertanian hendaknya menggunakan indikator luas panen.

Tabel 11 Persentase Wilayah Basis Komoditi Jagung Provinsi Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Luas Tanam dan Luas Panen Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Wilayah Basis Luas Tanam		Wilayah Basis Luas Panen	
		Jml	%	Jml	%
Kabupaten Boalemo	7	5	71,43	4	57,14
Kabupaten Gorontalo	18	10	55,56	10	55,56
Kabupaten Pohuwato	13	7	53,85	7	53,85
Kabupaten Bone Bolango	17	13	76,47	13	76,47
Kabupaten Gorontalo Utara	6	3	50,00	4	66,67
Kota Gorontalo	6	4	66,67	3	50,00
Provinsi Gorontalo	67	36	53,73	34	50,75

Sumber : Baruwadi, dkk (2014)

BAB VI

EKONOMI WILAYAH JAGUNG

A. Perkembangan Ekonomi Jagung pada PDRB Provinsi Gorontalo

Untuk menentukan posisi jagung pada ekonomi wilayah provinsi menggunakan beberapa asumsi: 1) produksi yang dihitung dan masuk dalam perhitungan PDRB adalah: produksi yang dipasarkan dalam bentuk ekspor dan antar pulau; 2) rata-rata harga jagung yang dipasarkan berkisar dari yang terendah Rp. 1000 dan tertinggi Rp. 2.300; 3) PDRB yang digunakan sebagai dasar analisis adalah PDRB berdasarkan harga berlaku. Jumlah jagung yang dipasarkan dalam bentuk ekspor dan antar pulau sebagaimana Tabel 12 memperlihatkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah tertinggi jagung yang dipasarkan terjadi pada tahun 2008 sebanyak 177.182 ton, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 69.204. Perbandingan antara ekspor dan antar pulau menunjukkan jumlah jagung yang diantarpulaukan lebih tinggi dibandingkan dengan yang diekspor. Jumlah ekspor jagung tertinggi terjadi pada tahun 2006, sedangkan jumlah jagung tertinggi yang diantarpulaukan terjadi pada tahun 2012.

Tabel 12 Jumlah Jagung Provinsi Gorontalo yang Diekspor dan Diantarpulaukan Selang Tahun 2003 sampai 2012

No	Tahun	Jagung yang Dipasarkan (ton)		
		Ekspor	Antar Pulau	Jumlah
1	2003	20.450	48.754	69.204
2	2004	39.032	31.107,3	70.139,3
3	2005	26.460	62.255	88.715
4	2006	112.042	21.573,6	133.616
5	2007	83.448	87.581	171.029
6	2008	79.385	97.797	177.182
7	2009	42.900	58.550	101.450
8	2010	34.387	122.671	157.058
9	2011	6.600	122.268	128.868
10	2012	32.500	137.507	170.007

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Gorontalo, 2013

PDRB merupakan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Untuk melihat peran komoditi jagung dalam ekonomi wilayah Provinsi Gorontalo salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan melihat perkembangan PDRB dari tahun ke tahun. Berdasarkan data ini besarnya sumbangan komoditas jagung pada ekonomi wilayah Gorontalo dapat dilihat. Untuk keseragaman analisis maka data PDRB yang digunakan untuk analisis ini berdasarkan atas harga berlaku tahun 2000. Perkembangan PDRB Provinsi Gorontalo sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 secara rinci disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13 PDRB Berdasarkan atas Harga Berlaku Provinsi
Gorontalo Tahun 2004 sampai tahun 2012 (*dalam milyar
rupiah*)

No	Lapangan Usaha	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	854	976	1242	1453	1848	2093	2332	2694	3001
	a. Tanaman Pangan	na	na	Na	Na	871	905.8	1039	1221	1392
	Jagung	77	106	174	239	389.8	228	361	289.9	391
	b. Tanaman Perkebunan	na	na	Na	Na	342	384	365	429.5	448
	c. Peternakan	na	na	Na	Na	235	281	335	372	417
	d. Kehutanan	na	na	Na	Na	40	58.8	67	76	82
	e. Perikanan	na	na	Na	Na	351	463	525	596	663
2	Pertambangan dan Penggalian	23	33	41	53	64	81	94.9	106	119
3	Industri Pengolahan	233	250	240	264	291	344.6	390.7	441	507
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	26	27	28	33.9	34	38.9	43.6	49.6	56
5	Bangunan	184	219	275	322	395	487.8	557	631	731
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	372	414	467	531	605	730	835.6	983	1144
7	Pengangkutan & Telekomunikasi	236	281	341	424	516	627.7	727.5	831	937
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan.	289	365	413	497	587	722	837	953	1145
9	Jasa-Jasa	586	916	1014	1183	1567	1943	2238	2465	2727
	PDRB	2802	3481	4062	4761	5907	7069	8056	9154	10368

Sumber : Baruwadi, dkk (2014)

Perkembangan PDRB Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh sektor pertanian. Tahun awal pengamatan yaitu tahun 2004 sumbangan sektor pertanian sebesar 854 milyar rupiah sedangkan tahun akhir pengamatan tahun 2000 sumbangan sektor ini menjadi 3,001 trilyun rupiah atau mengalami peningkatan 251,41% dari tahun awal

pengamatan. Kontribusi jagung bagi ekonomi wilayah secara agregat juga memperlihatkan perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2004 komoditas ini memberikan sumbangan 77 milyar rupiah, tahun 2012 meningkat menjadi 391 milyar. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan dari sisi ekspor maupun antar pulau dari komoditi ini, serta adanya peningkatan harga dari tahun ke tahun.

B. Struktur Ekonomi Jagung pada PDRB Provinsi Gorontalo

Analisis struktur ekonomi digunakan untuk mengetahui sumbangan atau peranan masing-masing kegiatan ekonomi atau sektor dalam perekonomian wilayah secara keseluruhan dalam suatu tahun tertentu. Melalui analisis ini dapat diketahui besarnya persentase atau kontribusi setiap sektor dalam PDRB.

Rumus yang digunakan untuk menghitung struktur ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh Amien (1996:86) yaitu:

$$\text{Struktur} = \frac{\text{Nilai PDRB sektor } i}{\text{Nilai PDRB total}} \times 100 \%$$

Hasil perhitungan struktur perekonomian Provinsi Gorontalo dari tahun 2004 sampai tahun 2012 disajikan pada Tabel 14. Berdasarkan data pada tabel tersebut meskipun sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi tetapi dari tahun ke tahun sektor ini mengalami penurunan. Tahun 2004 sumbangan sektor pertanian pada perekonomian Provinsi Gorontalo 30,47 %, tahun 2013 angka ini turun menjadi 28,95 %. Salah satu penyebab dari menurunnya kontribusi ini adalah naiknya kontribusi sector lain pada PDRB secara total, seperti halnya sector jasa-jasa. Dalam kurun waktu 2008-2012 sektor tanaman pangan mengalami penurunan dari 14,75% menjadi

13,43 %. Hal ini disebabkan antara lain oleh penurunan ekonomi jagung yaitu dari 6,43 % tahun 2004 menjadi 3,76 % pada tahun 2012.

Tabel 14 Struktur Perekonomian Provinsi Gorontalo selang Tahun 2004 – 2012 (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	30.47	28.04	30.58	30.51	31.28	29.61	28.95	29.43	28.95
	a. Tanaman Pangan	na	na	Na	na	14.75	12.81	12.90	13.33	13.43
	Jagung	2.75	3.06	4.28	5.03	6.60	3.23	4.48	3.17	3.77
	b. Tanaman Perkebunan	na	na	Na	na	5.79	5.44	4.54	4.69	4.32
	c. Peternakan	na	na	Na	na	3.98	3.97	4.16	4.06	4.02
	d. Kehutanan	na	na	Na	na	0.68	0.83	0.83	0.83	0.79
	e. Perikanan	na	na	Na	na	5.94	6.55	6.52	6.51	6.40
2	Pertambangan dan Penggalian	0.81	0.95	1.01	1.12	1.08	1.15	1.18	1.16	1.15
3	Industri Pengolahan	8.31	7.18	5.90	5.55	4.92	4.88	4.85	4.82	4.89
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0.91	0.79	0.70	0.71	0.58	0.55	0.54	0.54	0.54
5	Bangunan	6.57	6.29	6.78	6.77	6.68	6.90	6.92	6.89	7.05
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	13.27	11.89	11.49	11.14	10.25	10.33	10.37	10.74	11.03
7	Pengangkutan dan Telekomunikasi	8.44	8.07	8.41	8.92	8.74	8.88	9.03	9.08	9.04
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan.	10.31	10.48	10.17	10.44	9.93	10.21	10.39	10.41	11.05
9	Jasa-Jasa	20.92	26.31	24.95	24.84	26.54	27.49	27.78	26.93	26.30
	PDRB	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : Baruwadi, dkk (2013)

Sektor yang cenderung stabil mengalami peningkatan adalah sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan serta sector jasa-jasa. Pada tahun 2004 sektor keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan kontribusinya sebesar 10,31% dan pada tahun 2012 menjadi 11,05,

sedangkan sector jasa-jasa pada awal pengamatan kontribusinya sebesar 20,92 dan pada akhir pengamatan menjadi 26,30%.

C. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jagung pada PDRB Provinsi Gorontalo

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diukur berdasarkan peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari waktu ke waktu. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui hasil kinerja yang telah dicapai oleh suatu wilayah dalam melaksanakan pembangunan, terutama pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu metode yang dapat mengukur laju pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh Amien (1996:87) yaitu diukur melalui indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB}_x = \frac{\text{PDRB}_x - \text{PDRB}_{x-1}}{\text{Nilai PDRB total}} \times 100 \%$$

Kerangan :

PDRB_x = Pendapatan Domestik Regional Bruto tahun tertentu

PDRB_{x-1} = Pendapatan Domestik Regional Bruto 1 tahun sebelumnya

Berdasarkan data pada Tabel 15 terlihat bahwa laju pertumbuhan berbagai sektor ekonomi di Provinsi Gorontalo sangat fluktuatif selama periode pengamatan. Pada tahun awal pengamatan sektor pertanian mengalami pertumbuhan 3,52% persen sedangkan pada akhir

pengamatan laju pertumbuhan sektor pertanian menjadi 2,97% . Untuk sektor tanaman pangan berdasarkan ketersediaan data pertumbuhannya terlihat pada tahun 2009 capaiannya sebesar 0,491% pada tahun 2012 capaiannya sebesar 1,652%.

Khusus untuk komoditi jagung capaian laju pertumbuhannya cenderung fluktuatif pada awal tahun pengamatan laju pertumbuhannya adalah 0,84 % dan pada akhir tahun pengamatan laju pertumbuhannya 0,97 %. Pada tahun 2009 dan tahun 2011 pertumbuhan komoditi jagung mengalami penurunan. Hal ini antara lain disebabkan berkurangnya jumlah pasokan jagung sehingga mempengaruhi kinerja perdagangannya baik untuk kebutuhan ekspor maupun antar pulau.

Tabel 15 Pertumbuhan PDRB dan Sektor Ekonomi di Provinsi Gorontalo Tahun 2004-2013 (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun									
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	Pertanian		3.52	6.55	4.42	6.68	3.48	2.96	3.95	2.97	
	a) Tanaman Pangan		Na	na	Na	na	0.491	1.653	1.984	1.652	
	Jagung		0.84	1.66	1.38	2.55	-2.29	1.65	-0.78	0.97	
	b) Tanaman Perkebunan		Na	na	Na	na	0.60	-0.24	0.70	0.17	
	c) Peternakan		Na	na	Na	3.98	0.64	0.67	0.40	0.43	
	d) Kehutanan		Na	na	Na	0.68	0.27	0.10	0.10	0.06	
	e) Perikanan		Na	na	Na	na	na	na	Na	0.65	
2	Pertambangan dan Penggalian		0.30	0.20	0.25	0.18	0.25	0.17	0.12	0.13	
3	Industri Pengolahan		0.05	0.02	0.12	0.01	0.07	0.06	0.07	0.06	
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih		0.05	0.02	0.12	0.01	0.07	0.06	0.07	0.06	
5	Bangunan		1.00	1.39	0.98	1.23	1.32	0.86	0.80	0.97	
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran		1.21	1.30	1.34	1.27	1.77	1.31	1.61	1.55	
7	Pengangkutan dan Telekomunikasi		1.28	1.49	1.74	1.55	1.58	1.24	1.14	1.02	

8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perush.		2.18	1.20	1.75	1.52	1.91	1.43	1.26	1.86
9	Jasa-Jasa		9.47	2.42	3.55	6.51	5.32	3.66	2.48	2.52
PDRB			19.51	14.32	14.67	19.40	16.44	12.26	11.99	11.71

Sumber : Baruwadi, dkk (2014)

BAB VII

METODE PERBANDINGAN EKSPONENSIAL KEUNGGULAN JAGUNG

Berdasarkan studi Baruwadi, dkk (2014) tentang penetapan komoditas agro unggulan Provinsi Gorontalo, terdapat 10 komoditas pertanian yang menjadi unggulan Provinsi Gorontalo, yaitu: padi, jagung, cabe, kelapa, kelapa sawit, kakao, tebu, ayam KUR, sapi dan perikanan tangkap. Penetapan 10 komoditi merupakan hasil Diskusi Fokus Group yang melibatkan berbagai stakeholder. Stakeholder yang dilibatkan adalah: unsur petani, pengusaha, akademisi, pemerintah daerah dan lain-lain.

Untuk menentukan posisi ranking jagung diantara komoditi unggulan tersebut digunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE). Teknik ini digunakan sebagai pembantu bagi individu pengambilan keputusan untuk menggunakan rancang bangun model yang telah terdefinisi dengan baik pada tahapan proses. Untuk menentukan posisi jagung diantara komoditas pertanian unggulan, tahapan yang digunakan sebagai berikut :

1. Menyusun alternatif-alternatif keputusan yang akan dipilih sebagai bahan pertimbangan awal dalam menentukan keputusan pemilihan komoditi unggulan potensial yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

2. Menentukan kriteria atau perbandingan kriteria keputusan yang penting untuk dievaluasi, dalam hal ini diambil 13 kriteria yang telah baku dan telah digunakan pada umumnya dalam penentuan komoditi unggulan potensial. Hal ini mengacu pada kriteria yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
3. Menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria keputusan atau pertimbangan kriteria melalui wawancara yang mendalam (*indepth interview*) dan pengisian kuesioner (angket) oleh para pakar (*expert judgement*).
4. Melakukan penilaian terhadap 10 alternatif komoditi unggulan potensial yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo pada setiap kriteria yang telah ditetapkan.
5. Menghitung skor atau nilai total setiap alternatif komoditi agro unggulan potensial yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
6. Menentukan urutan prioritas keputusan didasarkan pada skor atau nilai total masing-masing alternatif komoditi pertanian unggulan potensial di Provinsi Gorontalo.

Adapun formulasi perhitungan skor untuk setiap alternatif komoditi pertanian unggulan potensial di Provinsi Gorontalo dalam MPE yaitu :

$$\text{Total nilai (TN}_i\text{)} = \sum_{j=1}^m (\text{RK}_{ij})^{\text{TKK}_j}$$

Keterangan :

TN_i : Total nilai alternatif ke-i

RK_{ij} : Derajat kepentingan relatif kriteria ke-j pada pilihan keputusan i

TKK_j : Derajat kepentingan kriteria keputusan ke-j ; TKK_j > 0 bulat

n : Jumlah pilihan keputusan

m : Jumlah kriteria keputusan

Penentuan tingkat kepentingan kriteria dilakukan dengan cara wawancara dengan pakar (*expert*) dan melalui kesepakatan curah pendapat. Sedangkan penentuan skor alternatif pada kriteria tertentu dilakukan dengan memberi nilai setiap alternatif berdasarkan kriterianya. Semakin besar nilai alternatif, semakin besar pula skor alternatif tersebut. Total skor masing-masing alternatif keputusan akan relatif berbeda secara nyata karena adanya fungsi eksponensial. Metode MPE memiliki keuntungan dalam mengurangi bias yang mungkin terjadi dalam analisa. Nilai skor yang menggambarkan urutan prioritas menjadi besar (fungsi eksponensial) ini, mengakibatkan urutan prioritas alternatif keputusan lebih nyata.

Indikator-indikator tersebut sebelumnya telah ditetapkan sesuai dengan standar baku yang sudah banyak dipakai oleh para pakar (*expert*). Adapun ke-13 indikator tersebut adalah nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, aspek pemasaran, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah, dukungan sumberdaya manusia, prestise daerah, kesiapan dan kesediaan masyarakat, kesiapan dan kesediaan pemerintah, kesiapan dan kesediaan pelaku usaha, kesiapan dan peran serta akademisi, aspek permodalan, serta ketersediaan sumberdaya buatan. Penentuan bobot kriteria penilaian terhadap 13 indikator ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan mengisi kuesioner oleh para pakar (*expert*), serta dihitung dengan metode *eckenrode*, sehingga didapatkan bobot kriteria penilaian 13 indikator tersebut seperti yang ada pada Tabel 16. Semakin besar angka bobot kriteria penilaian, maka semakin tinggi

tingkat kepentingan indikator/kriteria tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka bobot kriteria penilaian, maka semakin rendah tingkat kepentingan indikator/kriteria tersebut. Bobot ini menggunakan skala penilaian tingkat kepentingan 1-9 (skala likert).

Tabel 16 Indikator/Kriteria Penilaian Komoditi Unggulan dengan Metode MPE

No	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot Kriteria
1	Nilai Tambah Ekonomi	9
2	Nilai Tambah Sosial	8
3	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku	8
4	Aspek Pemasaran	9
5	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	8
6	Dukungan Sumberdaya Manusia	7
7	Prestise Daerah	5
8	Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat	6
9	Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah	6
10	Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha	7
11	Kesiapan dan Peran Serta Akademisi	5
12	Aspek Permodalan	6
13	Ketersediaan Sumberdaya Buatan	5

Sumber : Baruwadi, dkk (2014)

Setelah bobot kriteria penilaian didapatkan, maka dilakukan penilaian terhadap semua komoditas unggulan. Nilai alternatif yang didapatkan dari setiap komoditi tersebut merupakan nilai riil sesuai dengan kondisi aktual dilapangan. Selanjutnya nilai tersebut dikonversi dengan menggunakan skala penilaian 1-9 (skala likert). Adapun keuntungan dalam perhitungan ini yaitu untuk mengurangi bias yang mungkin terjadi dalam analisis. Nilai skor yang menggambarkan urutan prioritas menjadi besar (fungsi eksponensial) tersebut, mengakibatkan urutan prioritas alternatif keputusan akan lebih berbeda nyata.

Setelah dihitung dengan menggunakan teknik MPE, maka akan terlihat urutan atau peringkat komoditi unggulan yang potensial untuk dikembangkan. Nilai tersebut diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut : untuk setiap nilai alternatif dari masing-masing komoditi yang telah didapatkan, dipangkatkan (fungsi eksponensial) dengan bobot pada setiap indikator/kriteria yang telah ditetapkan, selanjutnya hasil dari fungsi eksponensial untuk seluruh indikator/kriteria dijumlahkan untuk masing-masing komoditi tersebut. Hasil perhitungan komoditi pertanian unggulan dengan menggunakan MPE dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17 Penilaian Alternatif Komoditi Pertanian Unggulan pada Setiap Indikator/Kriteria

No	Kriteria	Bobot	Nilai Alternatif Komoditas				
			Sapi	Cabe	Jagung	Padi	Kelapa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai Tambah Ekonomi	9	7	4	8	6.5	9
2	Nilai Tambah Sosial	8	4	5	8.5	7.5	7.5
3	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku	8	5.5	7.5	9	8.5	8
4	Aspek Pemasaran	9	5.5	8	8.5	8	7.5
5	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	8	6	4.5	9	5	3
6	Dukungan Sumberdaya Manusia	7	7	6	8	7.5	7
7	Prestise Daerah	5	4.5	8.5	9	5	8
8	Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat	6	4	8	8	7	8
9	Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah	6	6	5	9	5	5
10	Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha	7	3.5	4.5	7.5	5.5	8.5
11	Kesiapan dan Peran Serta Akademisi	5	8	3.5	8.5	7	7.5
12	Aspek Permodalan	6	4.5	4	8	5.5	7
13	Ketersediaan Sumberdaya Buatan	5	3	3	7.5	7	6.5

Sumber : Baruwadi, dkk (2014)

lanjutan

No	Kriteria	Bobot	Nilai Alternatif Komoditas				
			Kakao	Tebu	Kelapa Sawit	Perikanan Tangkap	Ayam Kur
(1)	(2)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Tambah Ekonomi	9	5.5	8	5.5	5	3.5
2	Nilai Tambah Sosial	8	5	8.5	7.5	5.5	6
3	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku	8	4	8	6.5	7	4
4	Aspek Pemasaran	9	5	7	7.5	6.5	3
5	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	8	5	5	4	5	6.5
6	Dukungan Sumberdaya Manusia	7	5.5	7	5	7	5
7	Prestise Daerah	5	6.5	7	3	7.5	4.5
8	Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat	6	5	6.5	3.5	7	4
9	Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah	6	5	5	4	5	5
10	Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha	7	4.5	7.5	4.5	6	4
11	Kesiapan dan Peran Serta Akademisi	5	6.5	5	3	7.5	5.5
12	Aspek Permodalan	6	5	7.5	5	6	5
13	Ketersediaan Sumberdaya Buatan	5	5	7	5.5	5	5

Sumber : Baruwadi, dkk (2014)

Berdasarkan hasil perhitungan MPE diperoleh peringkat (rangking) dari 10 komoditi pertanian unggulan antara lain peringkat (1) Kelapa; (2) Jagung ; (3) Tebu; (4) Padi ; (5) Cabe; (6) Kelapa Sawit; (7) Sapi; (8) Perikanan Tangkap; (9) Kakao; (10) Ayam Kur.

Tabel 18 Hasil Perhitungan Metode Perbandingan Eksponensial pada Komoditi Unggulan Provinsi Gorontalo

No	Komoditi Unggulan	Nilai MPE	Peringkat (Rangking)
1	Sapi	48,465,353.94	7
2	Cabe	145,694,246.45	5
3	Jagung	483,792,038.65	2
4	Padi	194,265,385.88	4
5	Kelapa	493,793,077.04	1
6	Kakao	7,668,093.87	9
7	Tebu	221,452,371.78	3
8	Kelapa Sawit	93,095,898.55	6
9	Perikanan Tngkap	30,991,798.15	8
10	Ayam Kur	5,169,956.89	10

Sumber : Baruwadi, dkk (2014)

Dari hasil perhitungan MPE tersebut dapat disimpulkan bahwa jagung berada pada urutan kedua dari 10 komoditi unggulan Provinsi Gorontalo nilai MPE sebesar 483,792,038.65.

BAB VIII

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AGROPOLITAN JAGUNG

Implementasi agropolitan jagung di Provinsi Gorontalo dilakukan mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten/kota. Untuk mendapatkan informasi ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen perencanaan baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk mendapatkan informasi di tingkat lapangan dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pejabat terkait, antara lain Bappeda, Dinas Pertanian, dan Badan Penyuluhan.

A. Tingkat Provinsi

Konsep agropolitan yang dijalankan pemerintah daerah dalam skala provinsi diwujudkan dalam sasaran pembangunan melalui 9 Pilar Pembangunan Agropolitan sebagaimana uraian berikut ini.

1. Penyediaan peralatan dan mesin pertanian yang pengelolaannya meliputi :
 - a. Penyediaan peralatan dan mesin pertanian (Alsintan) dalam bentuk Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).
 - b. Pembangunan Pusat Pelatihan dan Pendampingan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan.

- c. Untuk mendukung penanganan hasil yang optimal disiapkan Angkutan Agropolitan berupa beberapa unit mobil skala pedesaan yang didatangkan dari Jepang.

2. Penyediaan dana penjaminan petani

Para petani melalui kelompok tani dapat memanfaatkan dana penjaminan ini dengan mengajukan rencana kebutuhan biaya usaha tani melalui rencana kebutuhan kelompok. Penyediaan dana ini difasilitasi lewat APBN, APBD, ASKRINDO, Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI.

3. Penyediaan Benih Unggul, Pupuk dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

- a. Penyediaan benih unggul melalui penumbuhan dan pembinaan penangkar untuk benih-benih komposit
- b. Penyediaan Pupuk kerjasama PT. Pupuk Kaltim selaku penanggung jawab pengadaan dan penyediaan pupuk wilayah Indonesia Timur dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membangun Blending Pupuk NPK.
- c. Pengendalian Hama dengan cara :
 - Meningkatkan intensitas serta tindakan cepat dalam pengendalian OPT.
 - Meningkatkan SDM petugas pengendali OPT, penyuluh dan petani
 - Meningkatkan fasilitas sarana pemberantasan hama/ penyakit.
 - Menyediakan buffer stock pestisida .
 - Mengembangkan pengendalian dengan agens hayati

4. Memperlancar Pemasaran dan Jaminan Harga Dasar ;
 - a. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan pengusaha pedagang pengumpul, pedagang besar dalam mempertahankan tingkat harga yang layak untuk petani
 - b. Promosi dan kerjasama dengan pengusaha di luar daerah maupun di luar negeri dalam pemasaran jagung dan komoditi lainnya
 - c. Pembinaan dan penanganan pasca panen untuk meningkatkan kualitas produksi
 - d. Pembinaan pengolahan untuk menghasilkan produk olahan
5. Pembangunan/Penyediaan sarana pengairan dan Jalan Akses Agropolitan ;
 - a. Pembangunan sarana pengairan baik irigasi teknis, Irigasi non teknis irigasi desa, irigasi sederhana, pompa air tanpa mesin/ PATM.
 - b. Pembangunan jalan akses agropolitan terutama pada daerah-daerah potensial/sentra yang terisolasi.
6. Percontohan/*Show Window* di setiap Kabupaten dan Posko Agropolitan dengan tujuan antara lain ;
 - a. Mendekatkan pelayanan teknologi sekaligus sebagai percontohan kepada petani/keompok tani.
 - b. Menyiapkan lahan strategis dalam suatu kawasan sentra luasnya 50-100 ha dengan kegiatan utama adalah percontohan petani.
 - c. Cerminan pembangunan infrastruktur pembangunan agropolitan berbasis jagung.

- d. Pusat pembinaan Sumber Daya Manusia (Petani/Kelompok Tani).
 - e. Pengembangan komoditi terpadu dan pelestarian lingkungan hidup.
 - f. Obyek kunjungan sekaligus sebagai obyek Wisata Agro.
7. Peningkatan SDM Pertanian dengan fokus sasaran pada program yaitu ;
- SDM pertanian merupakan pendukung utama dalam keberhasilan pembangunan pertanian itu sendiri sehingga langkah yang dilakukan adalah kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kemandirian petani/kelompok tani dalam berusaha tani dan peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh/petugas (1 desa 1 penyuluh pertanian)
8. Meningkatkan Efektivitas/Peran *Maize Center* dalam Penelitian dan Pengkajian Teknologi.
- a. Melakukan kajian kesesuaian lahan untuk mendukung kemampuan lahan untuk menghasilkan rekomendasi teknologi dalam pencapaian hasil produksi yang optimal.
 - b. Melaksanakan pengembangan potensi dan keragaman sumber daya lokal secara efisien dengan memanfaatkan teknologi spesifik wilayah agar tercipta kemandirian lokal yang sustainable.
 - c. Melakukan percontohan budi daya, teknologi pra panen dan pasca panen serta pengolahan hasil.
 - d. Pemanfaatan limbah komoditi jagung/tanaman lain untuk lahan pupuk organik.

9. Perencanaan dan Koordinasi.

Untuk efektivitas dan efisien dalam pembangunan pertanian maka perlu perencanaan yang terkoordinasi dan terpadu dari berbagai instansi/unsur terkait baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Perencanaan dan koordinasi diharapkan dapat mampu menjawab, segala perubahan-perubahan yang bersifat insidental/mikro maupun secara makro karena dalam suatu proses perencanaan dan koordinasi pembangunan pertanian yang dimaksud adalah melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam suatu wilayah/daerah, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap dan tetap berpegang teguh pada azas prioritas pembangunan pertanian daerah yaitu Agropolitan.

Apabila dikaji secara rinci dari 9 pilar Program Agropolitan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah, telah memuat seluruh subsistem agribisnis. Subsistem dimaksud adalah:

- 1) Subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, meliputi Pilar 1 dan 3.
- 2) Subsistem usahatani, meliputi : Pilar 2, 5, 6 dan 8.
- 3) Subsistem Pengolahan hasil, meliputi: Pilar 4 dan 8.
- 4) Subsistem Pemasaran Hasil, meliputi : Pilar 4.
- 5) Subsistem Kelembagaan Penunjang, meliputi : 5, 7, 8 dan 9.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa konsep program agropolitan telah mencakup seluruh subsistem dalam sistem agribisnis dan hal ini telah sesuai dengan konsep agropolitan dalam konteks pembangunan daerah, sebagaimana yang disampaikan oleh

Anwar (1999) dan Darwanto (1999). Menurut Anwar pembangunan agropolitan merupakan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada kota-kota kecil yang diberikan perlengkapan infrastruktur perkotaan, sedangkan menurut Darwanto (1999) unsur – unsur pembentukan agropolitan adalah sektor unggulan, pusat–pusat perkotaan, potensi pemasaran dan prasarana wilayah.

1) *Sektor Unggulan*

Melalui program agropolitan Pemerintah Daerah telah menjadikan jagung sebagai komoditas pertanian unggulan. Pilar agropolitan merupakan upaya untuk mengoptimalkan keuntungan komparatif dari komoditi jagung secara terencana, berkelanjutan dan serasi.

2) *Pusat-pusat kegiatan agribisnis*

Pilar agropolitan secara tidak langsung telah menciptakan dan menumbuhkan kawasan-kawasan andalan yang berbasis pertanian yang merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pembangunan pertanian secara terintegrasi.

3) *Potensi pemasaran*

Pilar agropolitan secara spesifik memperhatikan efisiensi ekonomi produksi komoditas jagung melalui penciptaan harga dasar jagung. Kepastian harga jagung diharapkan menjadi motivasi bagi petani dalam kegiatan usahatani.

4) *Prasarana minimal pendukung kegiatan*

Sarana dan prasarana transportasi wilayah antara daerah produksi pertanian dan simpul-simpul jasa perdagangan dalam satu kawasan merupakan syarat dapat dikembangkannya suatu wilayah menjadi wilayah ekonomi yang maju. Hal ini dituangkan pula pada pilar agropolitan.

Dari 9 pilar program agropolitan yang dijalankan pemerintah daerah fokus utamanya adalah pada subsistem usahatani dan subsistem kelembagaan penunjang. Hal ini berarti sasaran program agropolitan adalah lebih terfokus pada peningkatan produksi dan penciptaan kelembagaan penunjang untuk mendukung keberhasilan program agropolitan. Langkah ini memang tepat diambil oleh pemerintah dalam menciptakan iklim yang dapat membangkitkan motivasi petani untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usahatani jagung. Ke depan nantinya program agropolitan hendaknya lebih diarahkan pada penciptaan nilai tambah produk yang dihasilkan dengan lebih memperhatikan subsistem pengolahan hasil.

Ditinjau dari aspek tata ruang Agropolitan di Provinsi Gorontalo secara umum belum menetapkan keberadaan hirarki kota-kota agropolitan. Hal ini cukup beralasan karena agropolitan masih terfokus pada satu komoditas unggulan yaitu jagung, sedangkan sistem hirarki kota agropolitan mengaitkan berbagai komoditas unggulan yang saling terkait. Struktur hierarki sistem kota-kota Agropolitan dapat digambarkan sebagai berikut :

Orde yang paling tinggi (kota tani utama) dalam lingkup wilayah Agropolitan skala besar berfungsi:

- Kota perdagangan yang berorientasi ekspor ke luar daerah (nasional dan internasional) dan bila berada di tepi pantai maka kota ini memiliki pelabuhan samudra.
- Pusat berbagai kegiatan *manufacturing* final industri pertanian (*packing*), stok pergudangan dan perdagangan bursa komoditas.
- Pusat berbagai kegiatan tertier agrobisnis, jasa perdagangan, asuransi pertanian, perbankan dan keuangan

- Pusat berbagai pelayanan termasuk *general agro-industry services*.

Orde kedua (pusat distrik agropolitan) yang berfungsi sebagai:

- Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis
- Pusat kegiatan agro-industri berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agro-bisnis.
- Pusat pelayanan agro-industri khusus (*special agro-industry services*), pendidikan, pelatihan dan pemuliaan tanaman unggulan.

Orde ketiga (pusat satuan kawasan pertanian)

- Pusat perdagangan lokal yang ditandai dengan adanya pasar harian
- Pusat koleksi komoditas pertanian yang dihasilkan sebagai bahan mentah industri
- Pusat penelitian, pembibitan dan percontohan komoditas
- Pusat pemenuhan pelayanan kebutuhan permukiman pertanian
- Koperasi dan informasi pasar barang perdagangan.

B. Tingkat Kabupaten/Kota

Sejak program agropolitan dengan entry point jagung digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, secara bersinergi program ini diimplementasikan pada setiap kabupaten/kota.

1. Kabupaten Boalemo

Di kabupaten Boalemo dalam menerapkan konsep agropolitan menetapkan wilayah yang menjadi kawasan agropolitan sekaligus

sebagai kawasan andalan yaitu di Desa Polohungo. Meskipun demikian secara tegas pemerintah kabupaten ini tidak menetapkan secara tegas kota Tani sebagaimana yang dipersyaratkan suatu kawasan agropolitan. Secara umum infrastruktur seperti halnya jalan dan jembatan dalam menunjang pelaksanaan konsep agropolitan cukup tersedia, kecuali pada wilayah-wilayah yang belum memiliki aksesibilitas seperti wilayah pegunungan infrastrukturnya masih terbatas. Sebagaimana wilayah lain dalam menunjang program agropolitan komoditi jagung dijadikan sebagai komoditi unggulan, selain padi sawah dan tanaman perkebunan.

Dalam pengelolaan produk unggulan pada umumnya pengelolaannya masih dilakukan secara parsial, belum terintegrasi dalam satu sistem agribisnis yang utuh dan menyeluruh. Pemasaran komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Boalemo masih sebatas dalam bentuk bahan baku sehingga memiliki nilai tambah yang rendah. Pengolahan hasil masih sebatas industri rumahan yang tingkat pemasarannya juga masih sangat terbatas. Pada awal pelaksanaan agropolitan di Kabupaten ini komoditi unggulan jagung diintegrasikan dengan ternak, tetapi pelaksanaannya belum optimal sehingga keberlanjutannya terhambat.

Dalam rangka pelaksanaan program agropolitan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu 9 pilar agropolitan dapat diidentifikasi pelaksanaannya pada setiap pilar. Untuk pilar pertama yaitu: Penyediaan Alat, Mesin Pertanian dan Angkutan Agropolitan sejak awal pelaksanaan agropolitan secara kontinu dilaksanakan, tetapi saat ini intensitasnya relatif berkurang. Untuk pilar kedua, yaitu Penyediaan Dana Peminjaman Petani hal ini tidak berkelanjutan. Oleh karena itu terkadang petani masih menggunakan jasa ijon dalam menjalankan usahatani. Pilar ketiga, yaitu: Penyediaan Benih Unggul, Pupuk dan Pengendalian Hama dan Penyakit. Dalam rangka menunjang

agropolitan pemerintah kabupaten maupun provinsi mengalokasikan dana yang cukup untuk pelaksanaan pilar ini. Saat ini penyediaan benih unggul, pupuk dan pengendalian hama dan penyakit untuk jagung masih terus dilakukan meskipun dalam porsi yang semakin kecil, hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Boalemo saat ini lebih memfokuskan penganggaran pada pengembangan komoditi Kakao.

Untuk pilar keempat yaitu: penciptaan pasar Jagung dan Penetapan Harga Dasar Jagung, sesungguhnya mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Pasar jagung yang ada diakumulasi menjadi jagung provinsi melalui penciptaan pasar ekspor dan antar pulau. Untuk pilar kelima, yaitu: Pembangunan Irigasi Sederhana dan Jalan Akses Agropolitan, pelaksanaan pilar ini pada awalnya memang terus dilakukan tetapi sifatnya tidak continue. Dalam pelaksanaan pilar ke enam, yaitu: *Show Window* dan Posko Agropolitan umumnya dilaksanakan pada wilayah yang ditetapkan menjadi sentra agropolitan seperti halnya di desa Polohungo. Akan tetapi seiring dengan bergesernya focus perhatian komoditi pemerintah daerah Boalemo maka pelaksanaan pilar ini semakin meredup. Dalam hal pelaksanaan pilar ketujuh, yaitu Peningkatan kualitas SDM di Bidang Pertanian terus dilakukan di Kabupaten Boalemo sejak pencanangan agropolitan sebagai program unggulan, sampai saat ini. Akan tetapi fokusnya sudah bergeser dari jagung ke kakao, sedangkan untuk pilar kedelapan Pembangunan *Maize Center* mengikuti program provinsi dimana penetapan pilar ini dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan keberadaannya ditempatkan di luar wilayah Kabupaten Boalemo. Sedangkan untuk pelaksanaan pilar kesembilan, yaitu Perencanaan dan Koordinas terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Boalemo baik antar SKPD di Kabupaten Boalemo maupun di tingkat Provinsi.

2. Kabupaten Gorontalo

Kabupaten Gorontalo termasuk salah satu wilayah yang menjadi andalan dalam penerapan program agropolitan di Provinsi Gorontalo. Dalam menerapkan konsep agropolitan di Kabupaten Gorontalo, pemerintah daerah ini membangun suatu kawasan yang menjadi sentra agropolitan berbasis jagung di Desa Tenilo Kecamatan Limboto. Di wilayah ini dibangun kawasan penanaman jagung dan *show windows* yang menjadi percontohan dalam pengembangan jagung. Keberadaan wilayah yang menjadi pusat agropolitan jagung di kabupaten ini sekaligus ingin menjadikan wilayah Tenilo sebagai kota tani yang berbasis jagung. Dalam hal infrastruktur, Kabupaten Gorontalo adalah wilayah yang memiliki sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dalam mendukung konsep agropolitan, karena memiliki lapangan udara, wilayahnya strategis sebagai penyangga ibu kota provinsi, serta aksesibilitasnya lancar dalam menunjang perpindahan orang, barang dan jasa.

Dalam program agropolitan komoditi yang menjadi unggulan Kabupaten ini adalah jagung dan padi sawah. Dalam konsep agropolitan, jagung dijadikan sebagai komoditi fokus sebagaimana yang ditetapkan pemerintah provinsi. Titik berat dalam Konsep agropolitan di Kabupaten Gorontalo adalah peningkatan produktivitas jagung dalam rangka memenuhi kebutuhan ekspor, sehingga dilakukan perbaikan dalam system pengadaan sarana produksi, usaha taninya dan pemasaran, sedangkan untuk subsistem sarana penunjang seperti halnya kegiatan penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan pemerintah provinsi melalui *maize centre*. Hal yang belum dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah kabupaten adalah dari subsistem pengolahan hasil, dimana sampai tahun ke sepuluh pelaksanaan agropolitan agroindustri yang menyerap bahan baku jagung yang dihasilkan di wilayah ini

belum ada. Pengolahan hasil dari komoditi jagung baru sebatas industri rumah tangga yang memiliki nilai tambah yang relatif kecil dan pangsapasar juga yang masih terbatas sehingga mengancam keberlanjutan industri rumah tangga yang ada di wilayah ini.

Untuk pelaksanaan 9 pilar agropolitan sebagai implementasi dari konsep agropolitan Provinsi Gorontalo dapat diidentifikasi dari pelaksanaan masing-masing pilar di Kabupaten Gorontalo. Untuk pilar pertama yaitu: Penyediaan Alat, Mesin Pertanian dan Angkutan Agropolitan pelaksanaannya dilakukan sejak awal pelaksanaan agropolitan seiring dengan penetapan kawasan agropolitan. Pelaksanaan pilar ini dilaksanakan pula pada wilayah-wilayah lain di Kabupaten Gorontalo. Sampai saat ini pelaksanaan pilar ini masih terus dilaksanakan oleh pemerintah meskipun dengan skim program yang berbeda. Untuk pilar kedua, yaitu Penyediaan Dana Peminjaman Petani khusus untuk usahatani jagung tidak berkelanjutan, sehingga petani terkadang beralih pada peminjaman dana pada lembaga keuangan atau terbelit pada system ijon.

Pelaksanaan Pilar ketiga, yaitu: Penyediaan Benih Unggul, Pupuk dan Pengendalian Hama dan Penyakit, dialokasikan dana oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo maupun Provinsi Gorontalo. Sampai saat ini pelaksanaan pilar ketiga ini masih tetap dilakukan dalam rangka peningkatan produktivitas jagung. Untuk pilar keempat yaitu : penciptaan pasar Jagung dan Penetapan Harga Dasar Jagung, masih mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Pasar jagung yang ada diakumulasi menjadi jagung provinsi melalui penciptaan pasar ekspor dan antar pulau. Untuk pilar kelima, yaitu: Pembangunan Irigasi Sederhana dan Jalan Akses Agropolitan, pelaksanaan pilar ini di Kabupaten Gorontalo dilaksanakan untuk menunjang program

agropolitan. Untuk irigasi sederhana ini dikembangkan system pompa air tanpa mesin dalam mengalir lahan usaha tani.

Untuk pelaksanaan pilar ke enam di Kabupaten Gorontalo, yaitu: Show Window dan Posko Agropolitan dilaksanakan pada wilayah yang ditetapkan menjadi sentra agropolitan seperti halnya di desa Tenilo. Posko agropolitan juga dilaksanakan di wilayah-wilayah yang menjadi sentra usahatani jagung. Saat ini pelaksanaan pilar keenam ini tidak seperti awal pelaksanaan program agropolitan. Untuk pelaksanaan pilar ketujuh, yaitu Peningkatan kualitas SDM di Bidang Pertanian terus dilakukan seperti halnya lewat peningkatan keterampilan petani, penyuluh dan SDM perencana. Sampai saat ini pilar ini terus dilakukan meskipun tidak menfokuskan pada komoditi jagung, tetapi tetap memasukkan jagung sebagai komoditi unggulan.

Untuk pilar kedelapan yaitu Pembangunan *Maize Center* mengikuti program provinsi dimana penetapan pilar ini dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dimana keberadaan lembaga ini ditempatkan di luar wilayah Kabupaten Gorontalo, yaitu di Kabupaten Bone Bolango. Sedangkan untuk pelaksanaan pilar kesembilan, yaitu Perencanaan dan Koordinas terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gorontalo baik antar SKPD di Kabupaten Gorontalo maupun di tingkat Provinsi.

Dalam rangka menunjang program agropolitan, pemerintah Kabupaten Gorontalo juga mendirikan kelembagaan yang bernama Agro Potombulu. Lembaga ini membantu petani dalam hal pelatihan, penyuluhan serta penyaluran benih dan pupuk serta membantu petani petani dalam pemasaran jagung. Sesungguhnya implementasi agropolitan di Kabupaten Gorontalo ini telah mendekati konsep yang dikemukakan oleh Friedman, tetapi hal ini belum didukung oleh keberadaan agroindustri berbahan baku jagung. Industri yang ada hanya sebatas industri rumah tangga, sehingga jagung yang dihasilkan

hanya diekspor atau diantarpulaukan dalam bentuk bahan baku jagung. Keadaan ini tentunya berdampak pada nilai tambah yang diterima oleh petani kecil.

Saat ini meskipun agropolitan gaungnya tidak seperti sebelumnya tapi perhatian pemerintah terhadap komoditi jagung masih terus dilakukan melalui berbagai program seperti halnya bantuan benih maupun pupuk.

3. Kabupaten Pohuwato

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu wilayah yang menjadi andalan Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan program agropolitan jagung. Untuk penerapannya ditetapkan kawasan agropolitan di kabupaten ini, yaitu di Kecamatan Patilanggio, masing-masing di desa Balayo, Suka Makmur, Ilohelumo, Dulomo, Manawa dan Dulomo. Desa-desanya ini menjadi percontohan agropolitan untuk wilayah Pohuwato, mulai dari kelembagaan usahatani, cara bercocok tanam, penggunaan teknologi dalam hal benih dan pupuk serta panen dan pascapanen. Infrastruktur yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan konsep agropolitan cukup menunjang, bahkan di wilayah ini dibuat Silo sebagai tempat pengeringan jagung yang telah dipanen dan selanjutnya disalurkan untuk kebutuhan ekspor maupun antar pulau. Jumlah Silo yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Pohuwato saat pelaksanaan program agropolitan mencapai 4 buah.

Secara umum terlihat bahwa dalam konsep agropolitan yang diterapkan di Kabupaten Pohuwato fokus kegiatannya masih sebatas pada upaya peningkatan produktivitas untuk mencapai target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah baik kabupaten, maupun provinsi. Hal yang belum dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten Pohuwato adalah subsistem pengolahan hasil. Umumnya

jagung yang dihasilkan dipasarkan dalam bentuk pipilan kering sehingga memiliki nilai tambah yang relatif kecil. Pengolahan hasil jagung di Kabupaten Pohuwato baru sebatas industri rumah tangga yang memiliki nilai tambah yang relatif kecil dan pangsa pasar juga yang masih terbatas sehingga tidak mampu bertahan dalam menghadapi persaingan pasar dalam produk yang sejenis.

Implementasi program agropolitan Provinsi Gorontalo di Kabupaten Pohuwato dapat diidentifikasi dari pelaksanaan 9 pilar agropolitan yang menjadi indikator pelaksanaan program ini. Dalam pelaksanaan pilar pertama yaitu: Penyediaan Alat, Mesin Pertanian dan Angkutan Agropolitan sejak awal pelaksanaan agropolitan secara kontinu pilar ini dilaksanakan dengan memadukan antara program kabupaten dan provinsi. Sampai saat ini penyediaan alat dan mesin pertanian masih terus dilakukan walaupun dilakukan dalam bentuk paket lainnya, tetapi masih mengandalkan juga komoditi jagung. Untuk pelaksanaan pilar kedua, yaitu Penyediaan Dana Peminjaman Petani dilakukan secara bersinergi dengan pemerintah provinsi, meskipun saat ini untuk komoditi jagung penyediaan dana ini semakin berkurang. Kondisi ini mendorong petani menggunakan jasa keuangan non formal dalam pengadaan modalnya untuk kegiatan usahatani jagung. Penggunaan lembaga keuangan nonformal ini menyebabkan petani sering terjebak dalam system ijon.

Penyediaan Benih Unggul, Pupuk dan Pengendalian Hama dan Penyakit yang merupakan pilar ketiga menjadi kegiatan prioritas dalam implementasi program agropolitan di Kabupaten Pohuwato. Dalam rangka menunjang agropolitan pemerintah kabupaten maupun provinsi mengalokasikan dana yang cukup untuk pelaksanaan pilar ini. Hal ini dilakukan selain memberikan insentif kepada petani dalam berusahatani jagung, juga dimaksudkan untuk peningkatan

produktivitas jagung. Saat ini penyediaan benih unggul, pupuk dan pengendalian hama dan penyakit untuk usahatani jagung masih terus dilakukan tetapi tidak sebesar pada saat program agropolitan dijadikan sebagai program unggulan.

Penciptaan pasar Jagung dan Penetapan Harga Dasar Jagung merupakan pilar keempat. Pilar ini dilaksanakan secara bersinergi dengan kebijakan pemerintah provinsi melalui penetapan harga dasar jagung dan juga penciptaan peluang pasar baik ekspor maupun antar pulau. Dalam rangka penciptaan pasar jagung di Kabupaten Pohuwato, pemerintah Kabupaten Pohuwato melakukan kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan. Wujud dari kerjasama ini perusahaan Korea yaitu PT. Harim membangun perkantoran di wilayah Paguat dan membangun kemitraan dengan pemerintah dan petani dalam pembelian jagung di wilayah ini.

Untuk pilar kelima, yaitu: Pembangunan Irigasi Sederhana dan Jalan Akses Agropolitan dilaksanakan secara terintegrasi pula dengan program provinsi. Dalam pelaksanaan pilar ke enam, yaitu: Show Window dan Posko Agropolitan umumnya dilaksanakan pada wilayah yang ditetapkan menjadi sentra agropolitan yaitu di desa-desa Balayo, Suka Makmur, Ilohelumo, Dulomo, Manawa dan Dulomo. Dalam hal pelaksanaan pilar ketujuh, yaitu Peningkatan kualitas SDM di Bidang Pertanian senantiasa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pohuwato, akan tetapi saat ini tidak terfokus pada komoditi jagung saja tetapi juga pada komoditi tanaman pangan lainnya seperti: padi sawah. Sedangkan untuk pelaksanaan pilar kesembilan, yaitu Perencanaan dan Koordinas terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pohuwato baik secara vertical maupun horizontal.

4. Kabupaten Bone Bolango

Sebagaimana kabupaten lainnya, program agropolitan jagung telah memberikan peningkatan motivasi petani Kabupaten Bone Bolango dalam berusaha tani jagung. Oleh karena itu hampir di setiap wilayah penanaman jagung diintensifkan melalui berbagai kegiatan berdasarkan payung program agropolitan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam menerapkan konsep agropolitan di Kabupaten Bone Bolango, pemerintah daerah kabupaten ini menetapkan kawasan agropolitan di desa Moutong Kecamatan Tilongkabila. Kawasan ini sengaja dibangun sebagai sentra jagung yang menjadi percontohan dalam kegiatan usahatani yang intensif dengan menggunakan paket teknologi di bidang benih, pupuk maupun cara bercocok tanam. Dalam hal infrastruktur yang menunjang konsep agropolitan, Kabupaten Bone Bolango adalah wilayah yang memiliki sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup memadai mengingat wilayah ini sebagai penyangga ibukota Provinsi Gorontalo karena wilayahnya yang berbatasan langsung dengan pusat pemerintahan provinsi.

Dalam program agropolitan komoditi yang menjadi unggulan Kabupaten Bone Bolango adalah jagung dan padi sawah. Dalam konsep agropolitan, jagung dijadikan sebagai komoditi fokus sebagaimana yang ditetapkan pemerintah provinsi. Titik berat dalam Konsep agropolitan di Kabupaten Bone Bolango masih pada peningkatan produktivitas untuk mengejar target sejuta ton jagung yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi. Melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dibangun juga Pusat Informasi Jagung (*Maize Centre*) yang berlokasi di kabupaten ini. Dalam hal pengolahan hasil pemerintah Kabupaten Bone Bolango bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo membangun Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) yang

dimaksudkan untuk mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi jagung. Akan tetapi hal ini belum efektif terlaksana disebabkan oleh tingginya kompetisi produk-produk yang dihasilkan oleh KIAT. Industri yang dihasilkan oleh KIAT baru sebatas produk makanan ringan dari jagung yang banyak beredar di pasaran. Mutu dan kemasan dari produk yang dihasilkan masih rendah menyebabkan industri ini tidak mampu bersaing dengan produk sejenis yang sudah ada di pasaran.

Keberadaan KIAT dan *Maize Centre* di Kabupaten Bone Bolango sesungguhnya merupakan prasarana penting dalam mewujudkan suatu kawasan agropolitan. Selain itu keberadaan kabupaten ini sebagai wilayah penyangga pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo, member peluang wilayah ini dapat menerapkan konsep agropolitan sesungguhnya. Akan tetapi karena dilakukan secara tidak berkelanjutan menyebabkan kawasan agropolitan sesungguhnya tidak tercipta di kabupaten ini.

Dalam rangka pelaksanaan program agropolitan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu 9 pilar agropolitan, pelaksanaannya dapat diidentifikasi melalui pelaksanaannya pada setiap pilar. Dalam pelaksanaan pilar pertama yaitu: Penyediaan Alat, Mesin Pertanian dan Angkutan Agropolitan sejak awal pelaksanaan agropolitan secara kontinu pilar ini dilaksanakan dengan memadukan antara program kabupaten dan provinsi. Saat ini bantuan dalam hubungannya dengan pilar ini masih terus dilakukan meskipun dalam intensitas yang semakin berkurang. Pelaksanaan pilar kedua, yaitu Penyediaan Dana Peminjaman Petani hal ini diulakukan pula secara bersinergi dengan pemerintah provinsi, meskipun saat ini untuk komoditi jagung semakin berkurang. Hal ini menyebabkan petani terjebak dalam system ijon dalam pengadaan dana untuk usahatannya.

Untuk pelaksanaan Pilar ketiga, yaitu: Penyediaan Benih Unggul, Pupuk dan Pengendalian Hama dan Penyakit menjadi kegiatan prioritas dalam implementasi program agropolitan di Kabupaten Bone Bolango. Dalam rangka menunjang agropolitan pemerintah kabupaten maupun provinsi mengalokasikan dana yang cukup untuk pelaksanaan pilar ini. Saat ini penyediaan benih unggul, pupuk dan pengendalian hama dan penyakit untuk usahatani jagung masih terus dilakukan tetapi tidak sebesar pada saat awal program ini dijalankan.

Penciptaan pasar Jagung dan Penetapan Harga Dasar Jagung merupakan pilar keempat. Pilar ini dilaksanakan secara bersinergi dengan kebijakan pemerintah provinsi melalui penetapan harga dasar jagung dan juga penciptaan peluang pasar baik ekspor maupun antar pulau. Untuk pilar kelima, yaitu: Pembangunan Irigasi Sederhana dan Jalan Akses Agropolitan dilaksanakan secara terintegrasi pula dengan program provinsi. Dalam pelaksanaan pilar ke enam, yaitu: Show Window dan Posko Agropolitan umumnya dilaksanakan pada wilayah yang ditetapkan menjadi sentra agropolitan yaitu di desa Moutong, sedangkan posko agropolitan bangun pada wilayah-wilayah yang komoditi unggulannya adalah jagung. Dalam hal pelaksanaan pilar ketujuh, yaitu Peningkatan kualitas SDM di Bidang Pertanian senantiasa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi saat ini tidak terfokus pada komoditi jagung saja tetapi juga pada komoditi tanaman pangan lainnya seperti: padi sawah dan hortikultura.

Salah satu keunggulan Kabupaten Bone Bolango adalah dibanggunya *Maize Centre* yang menjadi pilar ke delapan di wilayah ini. Kegiatan lembaga ini tidak saja melayani keperluan Kabupaten Bone Bolango, tetapi seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Sedangkan untuk pelaksanaan pilar kesembilan, yaitu Perencanaan dan Koordinasi terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bone Bolango

baik antar SKPD di Kabupaten Bone Bolango maupun koordinasi dengan pemerintah di tingkat Provinsi.

5. Kabupaten Gorontalo Utara

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan kabupaten termuda di Provinsi Gorontalo yang terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2006. Kabupaten ini terbentuk saat konsep agropolitan di Provinsi Gorontalo telah memasuki tahun keempat. Dalam menerapkan konsep agropolitan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tidak menetapkan kawasan khusus agropolitan, tetapi menfokuskan konsep ini pada wilayah-wilayah yang potensial sebagai penghasil jagung. Sebagai kabupaten yang baru dimekarkan, kabupaten ini memiliki infrastruktur yang memadai dalam menunjang agropolitan, terlebih lagi kabupaten ini sebagai wilayah strategis karena memiliki pelabuhan laut yaitu pelabuhan Anggrek.

Dalam menjadikan jagung sebagai komoditi unggulan dalam program agropolitan program, kabupaten Gorontalo Utara menfokuskan pada peningkatan produksi, sama seperti dengan kabupaten lainnya di Provinsi Gorontalo. Hal ini dilakukan untuk mengejar target produksi yang ditetapkan, juga sebagai upaya untuk memenuhi pasar ekspor. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum memprioritaskan pengembangan komoditas jagung. Hal yang belum dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara adalah pengembangan agroindustri jagung. Pengolahan hasil dari komoditi jagung baru sebatas industri rumah tangga yang memiliki nilai tambah yang relatif kecil dan pangsa pasar juga yang masih terbatas sehingga usahanya tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Untuk pelaksanaan 9 pilar agropolitan sebagai implementasi dari konsep agropolitan Provinsi Gorontalo dapat diidentifikasi dari

pelaksanaan masing-masing pilar di Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk pilar pertama yaitu: Penyediaan Alat, Mesin Pertanian dan Angkutan Agropolitan pelaksanaannya dilakukan dengan mensinergikan program Kabupaten Gorontalo Utara dengan program pemerintah Provinsi Gorontalo. Untuk pilar kedua, yaitu Penyediaan Dana Peminjaman Petani khusus untuk usahatani jagung kondisinya tidak sebesar seperti halnya saat gaung agropolitan menggema.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Pemerintah Provinsi Gorontalo secara bersinergi melakukan penyediaan benih unggul, pupuk dan pengendalian hama dan penyakit sebagai implementasi pilar ketiga program agropolitan. Pemberian bantuan ini masih terus dilakukan dalam rangka mempertahankan produksi jagung. Untuk pilar keempat yaitu : penciptaan pasar Jagung dan Penetapan Harga Dasar Jagung, seperti halnya kabupaten lain di Provinsi Gorontalo masih mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, dimana Pasar jagung yang ada difasilitasi untuk kegiatan ekspor dan antar pulau. Untuk pilar kelima, yaitu: Pembangunan Irigasi Sederhana dan Jalan Akses Agropolitan, pelaksanaan pilar ini di Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan untuk menunjang program agropolitan. Untuk irigasi sederhana ini dikembangkan system pompa air tanpa mesin dalam mengaliri lahan usahatani.

Untuk pelaksanaan pilar ke enam di Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu: Show Window dan Posko Agropolitan dilaksanakan pada wilayah menjadi unggulan komoditas jagung. Saat ini pelaksanaan pilar keenam ini tidak seperti awal pelaksanaan program agropolitan. Untuk pelaksanaan pilar ketujuh, yaitu Peningkatan kualitas SDM di Bidang Pertanian terus dilakukan seperti halnya lewat peningkatan keterampilan petani, penyuluh dan SDM perencana. Sampai saat ini

pilar ini terus dilakukan meskipun tidak menfokuskan pada komoditi jagung, tetapi tetap memasukkan jagung sebagai komoditi unggulan.

Untuk pilar kedelapan yaitu Pembangunan *Maize Center* mengikuti program provinsi dimana penetapan pilar ini dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dimana keberadaan lembaga ini ditempatkan di luar wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan untuk pelaksanaan pilar kesembilan, yaitu Perencanaan dan Koordinas terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gorontalo Utara baik antar SKPD di Kabupaten Gorontalo maupun di tingkat Provinsi.

6. Kota Gorontalo

Kota Gorontalo adalah bagian dari Propinsi Gorontalo yang luas wilayahnya 64,79 KM atau sekitar 0,53% dari luas Propinsi Gorontalo. Secara geografis wilayah Kota Gorontalo terlerak antara 000 28' 17" - 000 35' 56" lintang utara (LU) dan 1220 59' 44" -1230 05' 59" bujur timur (BT).

Kota Gorontalo sebagai pusat pemerintah Provinsi Gorontalo sektor ekonominya tidak bertumpu pada sektor pertanian. Wilayah ini kontribusi terbesarnya dalam perekonomian wilayah disumbangkan oleh sektor jasa dan perdagangan. Meskipun demikian pemerintah Kota menjalan menjalankan Program Agropolitan berdasarkan arahan 9 pilar program agropolitan.

Dalam menjalankan program ini pemerintah Kota Gorontalo memfasilitasi pemberian bantuan kepada petani jagung berupa benih, pupuk dan pelatihan. Apabila mengacu pada konsep Agropolitan model Friedman Kota Gorontalo sesungguhnya sangat sesuai sebagai penyedia jasa dalam hal pengadaan sarana produksi, pemasaran maupun penelitian. Untuk mendukung hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang berkedudukan

di Kota Gorontalo. Salah satu misi dari keberadaan lembaga ini adalah menunjang program agropolitan jagung. Meskipun keberadaan lembaga ini turut berperan dalam mensukseskan program agropolitan tetapi lembaga ini belum sepenuhnya berperan dalam peningkatan nilai tambah jagung di Provinsi Gorontalo.

BAB IX

STRATEGI PENGEMBANGAN NILAI TAMBAH JAGUNG

Salah satu kendala dalam pengembangan konsep agropolitan di Provinsi Gorontalo adalah belum ada industri agro dalam skala sedang maupun besar di wilayah ini. Umumnya industri yang berkembang adalah makanan ringan yang dikelola dalam bentuk home industri. Dalam hubungan dengan agropolitan jagung maka perlu diupayakan strategi untuk mengembangkan nilai tambah produk agropolitan ini. Uraian di bawah ini menguraikan strategi pengembangan nilai tambah jagung di Provinsi Gorontalo yang dilakukan penulis dalam beberapa kajian. Untuk penetapan strategi menggunakan analisis SWOT yang merupakan strategi mempertimbangkan pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh komoditas jagung serta dengan memperhatikan peluang dan ancaman.

A. Penetapan Strategi Berdasarkan Analisis SWOT

Berdasarkan studi Baruwadi, dkk (2013) dan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Muhidong dan Baruwadi (2004) dapat ditetapkan strategi pengembangan nilai tambah jagung berdasarkan analisis SWOT. Analisis ini mengidentifikasi faktor internal yang terdiri dari kekuatan (S) dan kelemahan (W) Provinsi Gorontalo dalam hubungannya dengan pengembangan nilai tambah jagung serta faktor eksternal yang meliputi peluang (O) dan ancaman (T) pengembangan nilai tambah jagung dalam Program Agropolitan.

Komponen Uraian	Fakta [SWOT]
Target PEMDA Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo konsisten dalam melaksanakan Pengembangan jagung [S] • Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadikan Jagung sebagai Komoditi Fokus dalam Sistem Inovasi Daerah. [S] • Pemerintah Provinsi Gorontalo masih menjadikan jagung sebagai salah satu komoditi unggulan melalui pendekatan pengembangan kawasan kecamatan.[S]
Kondisi Internal Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB Provinsi Gorontalo masih tetap didominasi oleh sektor pertanian, 28,95%. [S] • Jagung sudah biasa dibudidayakan oleh masyarakat Gorontalo. [S] • Sebagian besar penduduk berkecimpung dalam usaha pertanian, sekitar 35,74%. [S] • Jagung merupakan komoditi basis pada 53,75% wilayah kecamatan berdasarkan luas panen. • Jagung merupakan komoditi special Provinsi Gorontalo dan merupakan komoditi yang paling menyebar pada setiap kecamatan. [S] • Kinerja ekspor dan antar pulau komoditi jagung cukup baik dari tahun ke tahun. [S] • Potensi lokal peternakan, terutama untuk ayam buras dan sapi, yang membutuhkan pakan berbasis jagung belum memadai untuk menciptakan pasar lokal. [W] • Petani masih sangat tergantung pada bantuan pemerintah dalam hal pengadaan sarana produksi. [W] • Gema Program Agropolitan jagung mulai berkurang. [W] • Wilayah yang menjadi percontohan agropolitan mulai berkurang. [W] • Kondisi iklim yang fluktuatif merupakan kendala utama dalam usahatani jagung. [T] • Adanya keterbatasan lahan menyebabkan petani melakukan penanaman di daerah miring yang mengancam kelestarian lingkungan. [T] • Lokasi tempat usahatani yang jauh dari tempat tinggal petani menyebabkan tingginya biaya tenaga kerja dalam kegiatan panen dan pasca panen. [T] • Posisi tawar petani dalam lembaga pemasaran rendah yang disebabkan Petani tidak memiliki fasilitas penyimpanan hasil panen jagung. [T] • Petani tidak memiliki keahlian dan pengetahuan untuk menentukan kadar air yang dipersyaratkan dalam memperoleh jagung yang berkualitas. [T]

	<ul style="list-style-type: none"> • Jagung yang dipasarkan petani hanya dalam bentuk pipilan sehingga nilai tambahnya relatif kecil. [W] • Pasar yang dihadapi petani dalam pemasaran jagung adalah bersifat monopsoni atau oligopsoni sehingga saat produksi jagung melimpah harga jagung rendah. [T] • Kelembagaan ekonomi dalam usahatani jagung seperti Koperasi belum maksimal dalam menjalankan fungsinya.[W] • Kelembagaan kelompok tani jagung belum sepenuhnya efektif baik dalam penyaluran sarana produksi maupun dalam pemasaran jagung. [W] • Kelembagaan yang bergerak di bidang jasa seperti transportasi dan keuangan belum dikuasai oleh petani dan sepenuhnya dikuasai oleh pedagang atau pengusaha. [W] • Motivasi petani untuk bertanam jagung sangat baik dan sudah merupakan bagian dari kultur budaya.[S] • Penetapan harga dasar jagung oleh pemerintah daerah cenderung dapat menstabilkan harga jagung di tingkat petani.[S] • Kendala pengembangan jagung di provinsi Gorontalo antara lain terkait dengan masalah ketersediaan saprodi, kelembagaan, pemasaran, dan serangan hama dan penyakit tanaman. Diantara kendala-kendala ini, benih merupakan kendala utama yang dirasakan oleh petani.[T]
Kondisi Lingkungan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia adalah net-importir benih jagung, jagung non-benih, dan ‘starch’, walaupun kenyataannya juga mengekspor jagung non-benih terutama ke Malaysia, Jepang, dan Korea.[T] • Kebutuhan jagung dalam negeri cenderung meningkat dari tahun ke tahun [O] • Trend harga jagung baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional cenderung meningkat dari tahun ke tahun [O] • Jagung selama ini lebih banyak diarahkan sebagai bahan baku pakan ternak dan merupakan tantangan untuk pengembangan industri pengolahan jagung lainnya [T] • Pengolahan jagung menjadi produk turunan semakin menggejala baik di Indonesia maupun pada tingkat dunia [O] • Syarat pasar baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional cukup ketat. [T] • Teknologi pengolahan jagung tersedia untuk segala tingkatan, baik untuk industri besar, menengah, maupun untuk industri rumah tangga. [O] • Produk-produk turunan jagung belum banyak diintroduksi di Provinsi Gorontalo. Mengingat produk turunan seperti ini rentan terhadap kualitas, peran instansi terkait sangat diperlukan untuk menjamin status gizi dan keamanannya. [T]

Dari uraian SWOT di atas strategi yang perlu dilakukan dalam pengembangan nilai tambah jagung adalah:

- Keberadaan industri pakan ternak merupakan alternatif pengolahan hasil jagung yang dapat dikembangkan di Provinsi Gorontalo. Meskipun demikian tantangannya cukup besar karena harus menghadapi kompetitor dari industri yang sama yang sudah lama menguasai pasar pakan ternak baik regional maupun nasional.
- Agar industri pakan ternak yang dibangun di Provinsi Gorontalo dapat terserap maka pasar lokal dari hasil industri ini harus diciptakan. Oleh karena itu pengembangan peternakan harus dilakukan secara bersama dengan pengembangan industri pakan ternak yang akan dibangun.
- Perlu adanya komitmen bersama dan saling bersinergi antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi dalam pengembangan nilai tambah jagung melalui industri pakan ternak untuk menunjang kontinuitas suplay bahan baku dan pemasaran produk pakan ternak.
- Pengembangan nilai tambah lainnya dari jagung adalah industri industri rumah tangga. Untuk mendukung pengembangan industri jenis ini maka pemerintah kabupate/kota dan didukung oleh pemerintah provinsi harus melakukan inovasi melalui introduksi dan pelatihan-pelatihan pembuatan produk olahan berbasis jagung kepada masyarakat dengan mencotoh pada daerah lain di Indonesia yang berhasil dalam pengembangan industri rumah tangga.
- Untuk pengembangan industri rumah tangga di Provinsi Gorontalo perlu memperhatikan standar mutu dan kemasan agar dapat memenuhi unsur-unsur keindahan, kebersihan, dan keamanannya untuk dikonsumsi.

- Untuk memasarkan hasil pengolahan jagung Provinsi Gorontalo perlu dibuatkan Website yang dikelola oleh lembaga khusus misalkan BUMD. Lembaga ini hendaknya secara aktif memonitor peluang-peluang pasar baik untuk pasar domestik maupun internasional produk olahan jagung, sehingga dapat terus melakukan penyesuaian produk yang dihasilkan dengan permintaan pasar.

Untuk mendukung pengembangan nilai tambah jagung diperlukan kontinuitas suplay bahan baku jagung melalui: pengembangan industri benih, insentif usahatani jagung, pengaturan jadwal penanaman jagung antar wilayah kabupaten/kota, serta diseminasi produk jagung yang berkualitas.

B. Strategi Inovasi Komoditas Jagung

Komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengembangan jagung dituangkan dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dimana komoditi fokusnya adalah jagung. Hal ini tertuang dalam dokumen Roadmap SIDA Provinsi Gorontalo (2013) yang menguraikan inovasi pengembangan jagung serta arah pengembangan, fokus dan program prioritasnya sebagaimana uraian berikut.

1. Strategi Inovasi Pengembangan Jagung

Strategi inovasi pengembangan jagung menjabarkan pernyataan yang menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran dalam pengembangan jagung. Strategi ini akan menjadi dasar dalam penetapan serangkaian arah kebijakan dalam pengembangan jagung di Provinsi Gorontalo.

- Penguatan sistem inovasi berbasis jagung melalui pengembangan agribisnis baik hulu maupun hilir.

Strategi ini dimaksudkan untuk memperkuat penumbuhkembangan inovasi berbasis jagung yang menunjang pengembangan sektor lain yang terkait seperti peternakan.

- Peningkatan daya saing agribisnis jagung melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan klaster industri jagung melalui revitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Strategi ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki Provinsi Gorontalo khususnya jagung agar memiliki daya saing industrial.
- Pengembangan jaringan kemitraan inovasi jagung yang berhubungan dengan *backward linkage* (keterkaitan kebelakang) dan *forward linkage* (keterkaitan kedepan) agribisnis. Strategi ini dilakukan untuk membangun kemitraan potensial agar tercipta dinamisasi pengetahuan, inovasi, difusi dan pembelajaran di bidang jagung. Jaringan kemitraan ini dilakukan dengan pemerintah, swasta dan perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- Pengembangan teknopreneur di bidang jagung. Strategi ini sebagai wahana modernisasi ekonomi dan sosial serta pengembangan budaya yang berhubungan dengan jagung.
- Pengembangan sinergitas untuk memperkuat keterpaduan dalam pemajuan inovasi di bidang jagung. Strategi ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergitas antara kelembagaan vertikal dan horizontal dalam melakukan inovasi melalui penguatan rantai nilai dalam jaringan atau klaster industri bidang jagung di Provinsi Gorontalo
- Penyesuaian inovasi jagung dan ternak dengan perkembangan global. Strategi ini dimaksudkan menyelaraskan inovasi jagung di Provinsi Gorontalo isu perkembangan global, terutama yang berhubungan dengan HAM, lingkungan, pasar dan mutu.

2. Arah Kebijakan Inovasi Jagung

Arah kebijakan inovasi jagung merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah dirumuskan di atas. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Inovasi jagung di Provinsi Gorontalo adalah:

- Mengembangkan kerangka dasar kebijakan inovasi bidang jagung. Tujuan utama dari arah kebijakan ini adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi bidang jagung dan ternak berbasis agribisnis.
- Menguatkan kelembagaan UMKM dalam mengembangkan usaha berbahan baku jagung yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu berinovasi dalam peningkatan mutu dan diversifikasi usaha industri jagung. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah memperkuat kelembagaan UMKM dalam pemajuan dalam mengakses dan memanfaatkan hasil penelitian dan pengetahuan yang berkaitan dengan inovasi jagung serta mampu mengembangkannya.
- Melakukan kemitraan bagi inovasi dan difusi inovasi agribisnis jagung. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah mendorong interaksi produktif multipihak yang berhubungan dengan inovasi jagung, dimana interaksi tersebut dapat menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, mendukung penyebarluasan hasil penelitian yang sesuai dengan potensi wilayah Provinsi Gorontalo.
- Membangun budaya inovasi jagung spesifik daerah yang menunjang pengembangan agroindustri dan industri rumah tangga. Tujuan utama dari arah kebijakan ini adalah membangun landasan

budaya kreatif inovatif dan kewirausahaan berbasis jagung, serta menumbuhkembangkan perusahaan agroindustri dan industri rumah tangga berbasis jagung yang dapat memperkuat kohesi sosial di Provinsi Gorontalo.

- Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan sistem inovasi bidang jagung yang menunjang pengembangan agribisnis. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah mendorong iklim investasi dan aktivitas inovasi di bidang jagung dimana hal tersebut saling melengkapi dan memperkuat rantai nilai dalam jaringan atau klaster industri jagung di wilayah Provinsi Gorontalo.
- Menyelaraskan inovasi jagung daerah dengan perkembangan global. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesiapan penentu kebijakan dan pemangku kepentingan yang terkait di Provinsi Gorontalo agar dapat memahami masalah dan kondisi global yang berhubungan dengan inovasi jagung di wilayah ini.

3. Program Prioritas Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan maka fokus program dan program prioritas pengembangan inovasi jagung diuraikan sebagai berikut.

- Program prioritas penguatan sistem inovasi berbasis jagung melalui pengembangan agribisnis baik hulu maupun hilir.
 - a. Program data base inovasi agribisnis jagung spesifik daerah
 - b. Program penyusunan regulasi inovasi dalam agribisnis jagung.
 - c. Program penguatan infrastruktur dasar inovasi dalam agribisnis jagung.

- d. Program insentif dalam pengembangan inovasi agribisnis jagung.
- Program prioritas peningkatan daya saing agribisnis jagung melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan klaster industri jagung dengan fokus pada revitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - a. Program penguatan kelembagaan kelompok tani dan kelompok usahata agribisnis jagung.
 - b. Program implementasi hasil iptek yang mendukung agribisnis jagung spesifik daerah.
 - c. Program penguatan kelembagaan UMKM dalam mengabsorpsi hasil iptek di bidang agribisnis jagung.
- Program prioritas pengembangan jaringan kemitraan inovasi jagung yang berhubungan dengan *backward linkage* (keterkaitan kebelakang) dan *forward linkage* (keterkaitan kedepan) agribisnis adalah:
 - a. Program peningkatan kemitraan antara pelaku agribisnis jagung dengan swasta dan lembaga iptek.
 - b. Program pemanfaatan hasil litbang bidang agribisnis jagung.
 - c. Program pemanfaatan layanan informasi dan teknologi dalam agribisnis jagung.
- Program prioritas pengembangan teknopreneur bidang jagung
 - a. Program pelatihan dan sekolah lapang spesifik inovasi agribisnis jagung.
 - b. Program peningkatan kompetensi pelaku agribisnis jagung dalam berinteraksi bisnis.
 - c. Program peningkatan pemanfaatan inovasi teknologi di bidang agribisnis jagung.

- d. Program pengembangan usaha agribisnis jagung yang inovatif
- Program prioritas pengembangan sinergitas untuk memperkuat keterpaduan dalam pemajuan inovasi di bidang jagung adalah:
 - a. Program penguatan dan pengembangan klaster industri jagung.
 - b. Program sinergitas kebijakan daerah dalam mendukung inovasi jagung.
 - c. Program sinergitas kelembagaan iptek dalam penciptaan inovasi jagung spesifik daerah.
- Program prioritas sinergitas inovasi jagung dan ternak dengan perkembangan global
 - a. Pemanfaatan hasil sampingan jagung
 - b. Sosialisasi dan pelatihan manajemen mutu produk jagung
 - c. Insentif HKI bidang inovasi jagung spesifik daerah
 - d. Pemberlakuan upah minimum standar

BAB X

PENUTUP

Penetapan jagung sebagai komoditi agropolitan cukup beralasan karena merupakan merupakan komoditi spesial, menyebar pada seluruh kecamatan di kabupaten/kota serta menjadi basis pada 53,73% seluruh kecamatan di Provinsi Gorontalo. Selain itu dari berbagai komoditi yang diunggulkan jagung menempati posisi kedua setelah kelapa. Meskipun demikian peran komoditas jagung bagi perekonomian wilayah Provinsi Gorontalo cenderung fluktuatif dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB dan pertumbuhannya. Oleh karena itu strategi dan pengembangan nilai tambah jagung sebagai produk unggulan dalam program agropolitan perlu dilakukan melalui pengembangan industri pakan ternak dan industri rumah tangga yang berdaya saing. Meskipun demikian dalam pengembangan pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo akan menghadapi kompetitor yang kuat karena sebagai pendatang baru, oleh karena itu perlu adanya sinergitas dan komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan nilai tambah jagung.

Kebijakan program agropolitan jagung pada kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo diimplementasikan dalam kerangka 9 pilar agropolitan, meskipun demikian konsep wilayah agropolitan belum sepenuhnya terbangun. Hal ini disebabkan konsep agropolitan yang dicanangkan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana konsep Friedman tetapi cenderung parsial sehingga menghambat keberlanjutannya. Oleh karena itu perlu dilakukan revitalisasi konsep

agropolitan dalam perencanaan wilayah dengan melaksanakan agribisnis jagung secara komprehensif mulai dari agribisnis hulu sampai hilir.

Komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengembangan jagung sebagai komoditi agropolitan dituangkan dalam dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDA). Dokumen ini menguraikan inovasi, arah pengembangan, fokus dan program prioritas pengembangan jagung. Keberadaan dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam menguatkan peran jagung sebagai komoditi yang menjadi pintu masuk dalam mengembangkan model pembangunan agropolitan sesuai konsep sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 2002. Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Dan Pedoman Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Departemen Pertanian R.I. Jakarta.
- Amien, Mappadjantji. 1996. Penataan Ruang Untuk Pembangunan Wilayah (Pendekatan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang Berdimensi Ruang). Pusat Studi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin
- Anwar, Affendi. 1999. pembangunan Agropolitan dalam Desentralisasi Spatial dengan Replikasi Sistem Kota-Kota Kecil di Wilayah Pedesaan. Makalah ini disampaikan dalam Seminar Pengembangan Agropolitan dan agribisnis serta dukungan Sarana dan Prasarana. Pusat Study Pembangunan Lembaga Penelitian IPB.
- Badan Lingkungan Hidup, Riset Dan Teknologi Informasi (Balihristi) Provinsi Gorontalo. 2013. Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Provinsi Gorontalo, *Tema : Jagung Terintegrasi Pakan Ternak*.
- Bappeda Provinsi Gorontalo. 2017. Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2017-2012
- Baruwadi, 2003. Perspektif Masyarakat Gorontalo Terhadap Program Agropolitan di Provinsi Gorontalo. Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo dengan Balitbangpedalda
- 2007. Road Map Komoditas Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo (*Laporan Hasil Penelitian*). Kerjasama Pusat Studi

- Pertanian Tropis Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo ----- 2009. Peran Program Agropolitan Terhadap Ketahanan Pangan di Provinsi Gorontalo (*Laporan Hasil Hibah Penelitian Strategi Nasional*). Lemli UNG
- dan Tim. 2011, 2012 dan 2013. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2011. (*Laporan Akhir EKPD*). Kerjasama Bappenas dengan UNG
- , Fitri Hadi Yulia Akib dan Yanti Saleh. 2013. Kaji Ulang Program Agropolitan Jagung Provinsi Gorontalo. (*Laporan Penelitian Hibah Kompetensi*). Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo
- dan Tim. 2014. Penetapan Komoditi Agro Unggulan Provinsi Gorontalo. (*Laporan Penelitian*). Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Gorontalo
- BPKP dan Bappeda Provinsi Gorontalo. 2006. Evaluasi Pelaksanaan Program Agropolitan Jagung. Bappeda Gorontalo
- BPS Provinsi Gorontalo. Gorontalo Dalam Angka 2007-2016.
- Darwanto, Herry. 1999. Kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional dalam Dukungan Pengembangan Agropolitan. Makalah disampaikan dalam Seminar Pengembangan Agropolitan dan Agribisnis serta Dukungan Sarana dan Prasarana. Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB.
- Harun, R Uton. 1999. Aspek Agropolitan dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah di Indonesia. Makalah disampaikan dalam Seminar Pengembangan Agropolitan dan Agribisnis serta dukungan Sarana dan Prasarana. Pusat Study Pembangunan Lembaga Penelitian IPB.

- Muhidong, Juanaedi dan Mahludin Bruwadi. 2004. Strategi Pengembangan Agroindustri Jagung Provinsi Gorontalo (*Laporan Penelitian*). Kerjasama Lemlit UNG dengan Balitbangpedalda
- Rustiadi dan Hadi. 2004. Pengembangan Sarana dan Prasarana Agropolitan. Diakses 12 Januari 2009
- Suharjo, A. 1991. Arti dan Ruang Lingkup Agribisnis. Makalah disampaikan dalam Penataran Dosen dalam rangka Peningkatan Mutu di Bidang Pertanian. Direktorat Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jakarta
- Tim Studi Unwim. 1997. Perencanaan Pengembangan Komoditas Agribisnis Unggulan di Kabupaten Tangerang. Bappeda Kabupaten Tangerang
- Todaro, Michael. 2000. Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga. Erlangga. Jakarta